



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu disusun Peta Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 178 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

KABAG HUKUM	DINASBADM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

KABAG HUKUM	DINAGHDAM SEKTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5);

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Boalemo;
5. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dari tingkat paling rendah sampai dengan tinggi dan menjadi kebutuhan pada Organisasi tersebut;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan di pemerintahan;

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	MABUP
				

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan;
8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;
9. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam suatu wadah jabatan;
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara;
11. Bezetting adalah Jumlah Pegawai yang dimiliki saat ini atau disebut juga Bezetting yang ada pada suatu Organisasi Perangkat Daerah dan menggambarkan posisi jabatan Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas kedudukan antara atasan dan bawahan pada suatu unit organisasi;

## BAB II






### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
  - b. Penyusunan formasi pegawai;
  - c. Pengadaan pegawai;
  - d. Pengangkatan jabatan;
  - e. Perencanaan pendidikan dan pelatihan;
  - f. Perencanaan karier;
  - g. Evaluasi jabatan;
  - h. Petunjuk kerja; dan
  - i. Pelaksanaan kelas Jabatan
- (2) Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi kekuatan dan kekurangan PNS pada Pemerintah Daerah;

KABAG HUKUM	DINAS/DAI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (3) Penyusunan formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usulan penambahan kekurangan PNS oleh Bupati kepada Menteri dalam jangka waktu tertentu yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan berpedoman pada hasil penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai;
- (4) Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses rekrutmen CPNS pada Pemerintah Daerah;
- (5) Rekrutmen CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah persetujuan formasi ditetapkan oleh Menteri;
- (6) Pengangkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penempatan dan atau pemindahan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Penempatan dan atau pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan berdasarkan pada nama-nama jabatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati ini;
- (8) Perencanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah pedoman pemberian diklat yang tepat bagi PNS sehingga meningkatnya pengetahuan kerja bagi pemegang jabatan dalam menjalankan tugasnya dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar;
- (9) Perencanaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memberikan arahan bagi rumusan perencanaan karier PNS Pemerintah Daerah;
- (10) Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan melalui sistem pengembangan pegawai yang dirancang berdasarkan jalur, jenjang, pangkat dan jabatan-jabatan yang pernah di pegang oleh seorang PNS berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (11) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan;
- (12) Petunjuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah merupakan pembuatan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan yang terdapat pada peta jabatan melalui analisa jabatan;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

- (13) Pelaksanaan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah penyusunan kelas jabatan untuk menetapkan tunjangan kinerja bagi PNS Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada hasil evaluasi jabatan, sehingga seorang PNS berhak mendapat imbalan sesuai dengan nilai kontribusi jabatannya yang dihitung dari tingkat kepentingan dan kesukaran pekerjaan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperoleh informasi tentang karakteristik pekerjaan yang ada pada setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

### BAB III

#### PETA JABATAN

### Pasal 4

- (1) Untuk menggambarkan kebutuhan Jabatan Struktural dan Fungsional dari tingkat paling tinggi sampai terendah pada suatu unit Organisasi Perangkat Daerah maka ditetapkan Peta Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Peta Jabatan Sekretariat Daerah;
  - Peta Jabatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Peta Jabatan Inspektorat Daerah;
  - Peta Jabatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - Peta Jabatan Dinas Kesehatan;
  - Peta Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Peta Jabatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan dan Pertanahan;
  - Peta Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja ;
  - Peta Jabatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - Peta Jabatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
  - Peta Jabatan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Peta Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Peta Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika;

KABAG HUKUM	DINAS/STAF KAMAR	ASS III	SEKDA	WABUP
				

- p. Peta Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - q. Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral
  - r. Peta Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - s. Peta Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - t. Peta Jabatan Dinas Pertanian;
  - u. Peta Jabatan Dinas Pangan;
  - v. Peta Jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - w. Peta Jabatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - x. Peta Jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - y. Peta Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - z. Peta Jabatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - aa. Peta Jabatan Kantor Camat Tilamuta;
  - bb. Peta Jabatan Kantor Camat Botumoito;
  - cc. Peta Jabatan Kantor Camat Mananggu;
  - dd. Peta Jabatan Kantor Camat Dulupi;
  - ee. Peta Jabatan Kantor Camat Paguyaman;
  - ff. Peta Jabatan Kantor Camat Wonosari;
  - gg. Peta Jabatan Kantor Camat Paguyaman Pantai;
  - hh. Peta Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah tani dan Nelayan
- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dijadikan dasar untuk penyusunan Bezetting;
- (2) Bezetting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan posisi PNS yang tersedia pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk menjelaskan kedudukan atasan dan bawahan;

KABAG HUKUM	DINAS DAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 3 Februari 2020

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

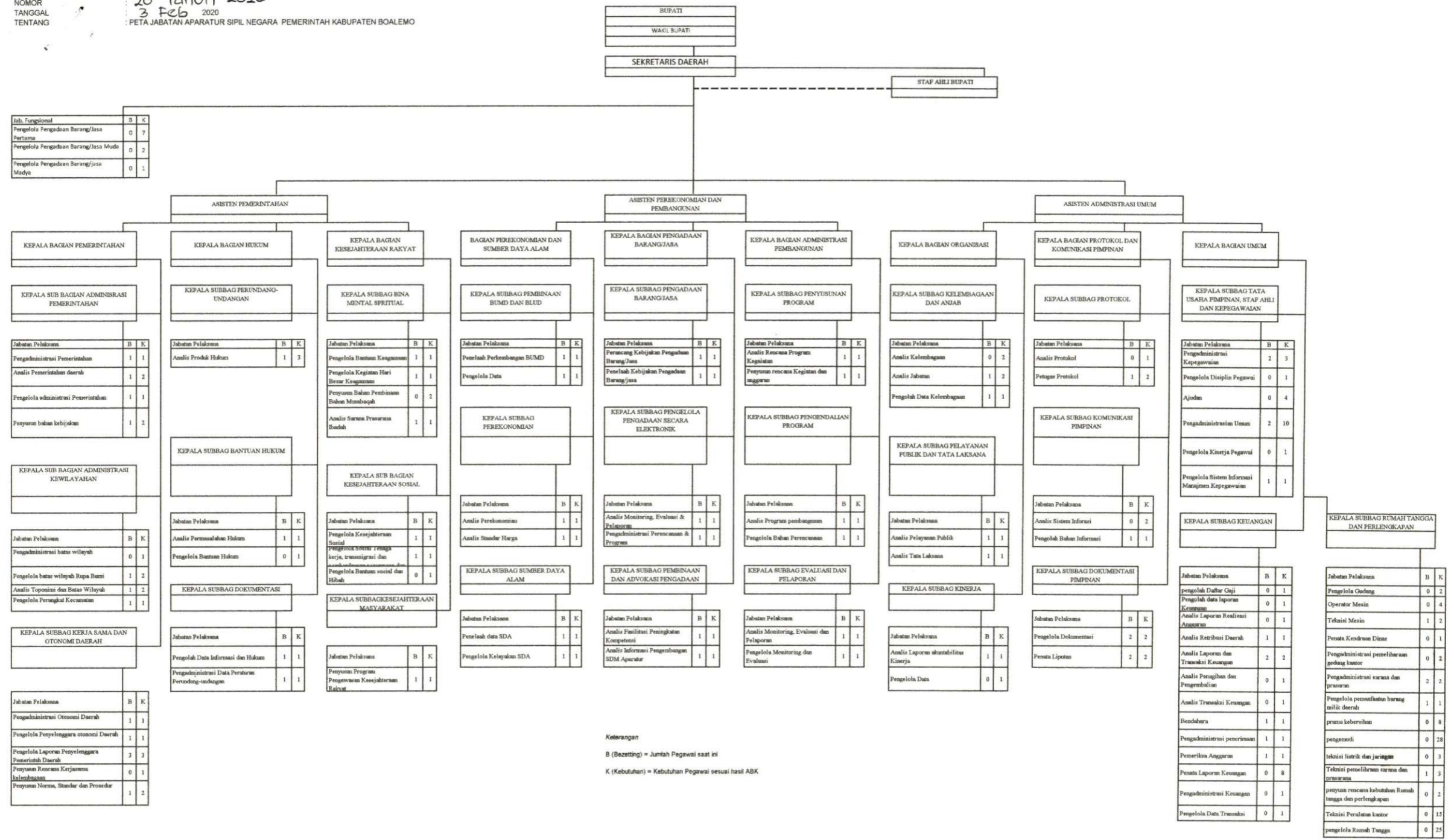
Pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 20 )





Keterangan  
 B (Beazetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



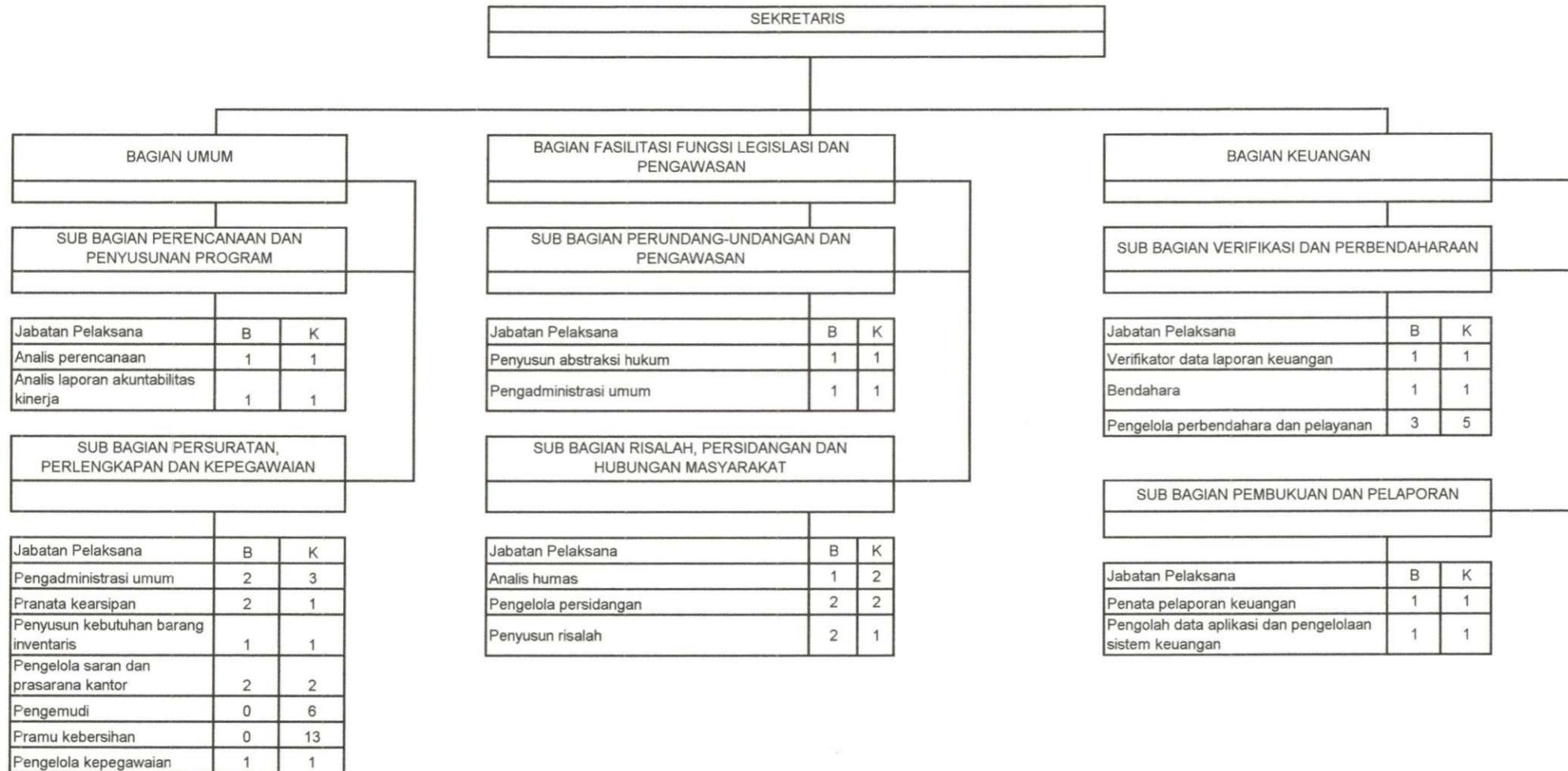
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Februari 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

**b. PETA JABATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOALEMO**



Keterangan

B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KOORDINATOR	DINAS/DEK	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

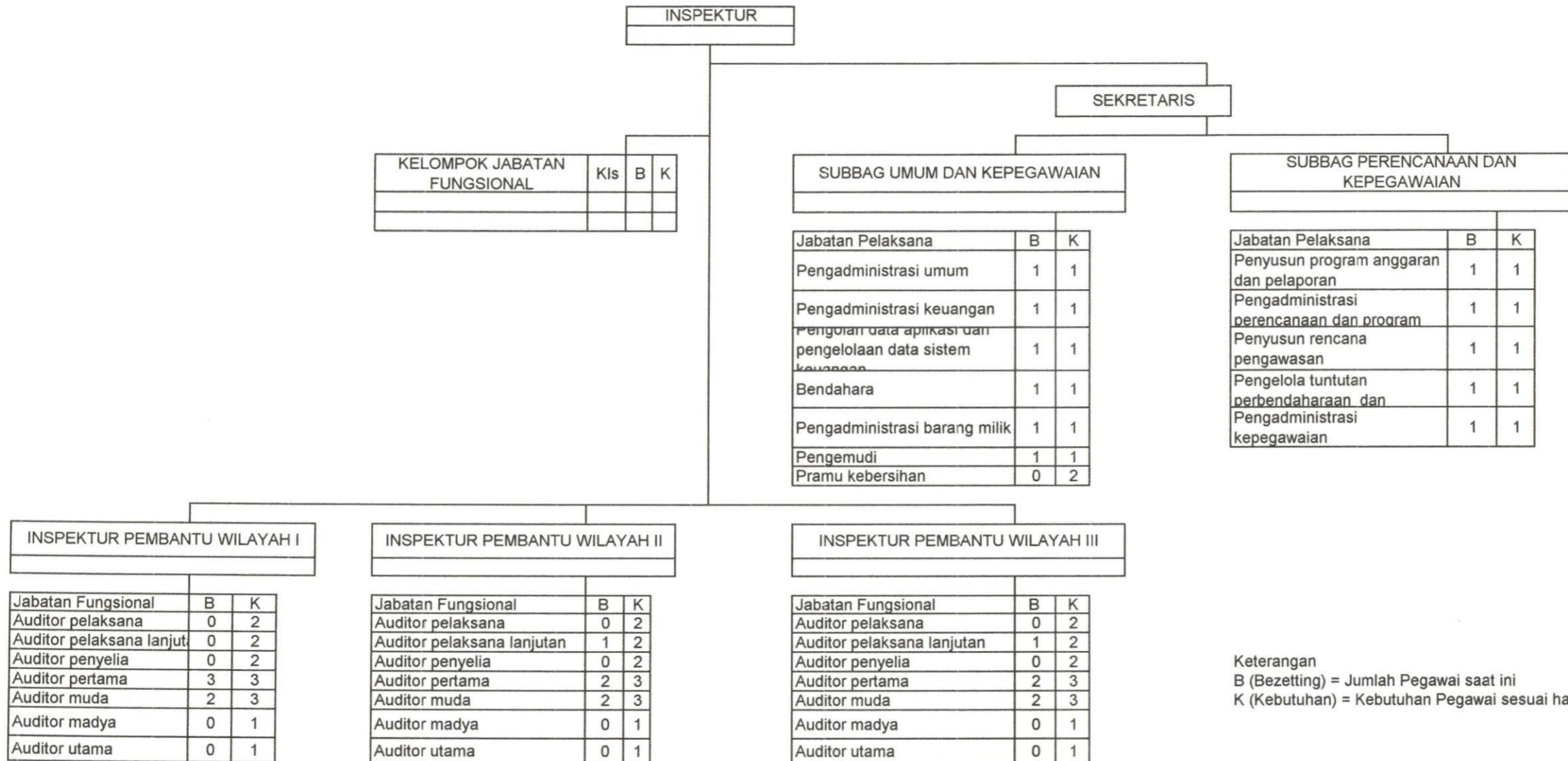
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Februari 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

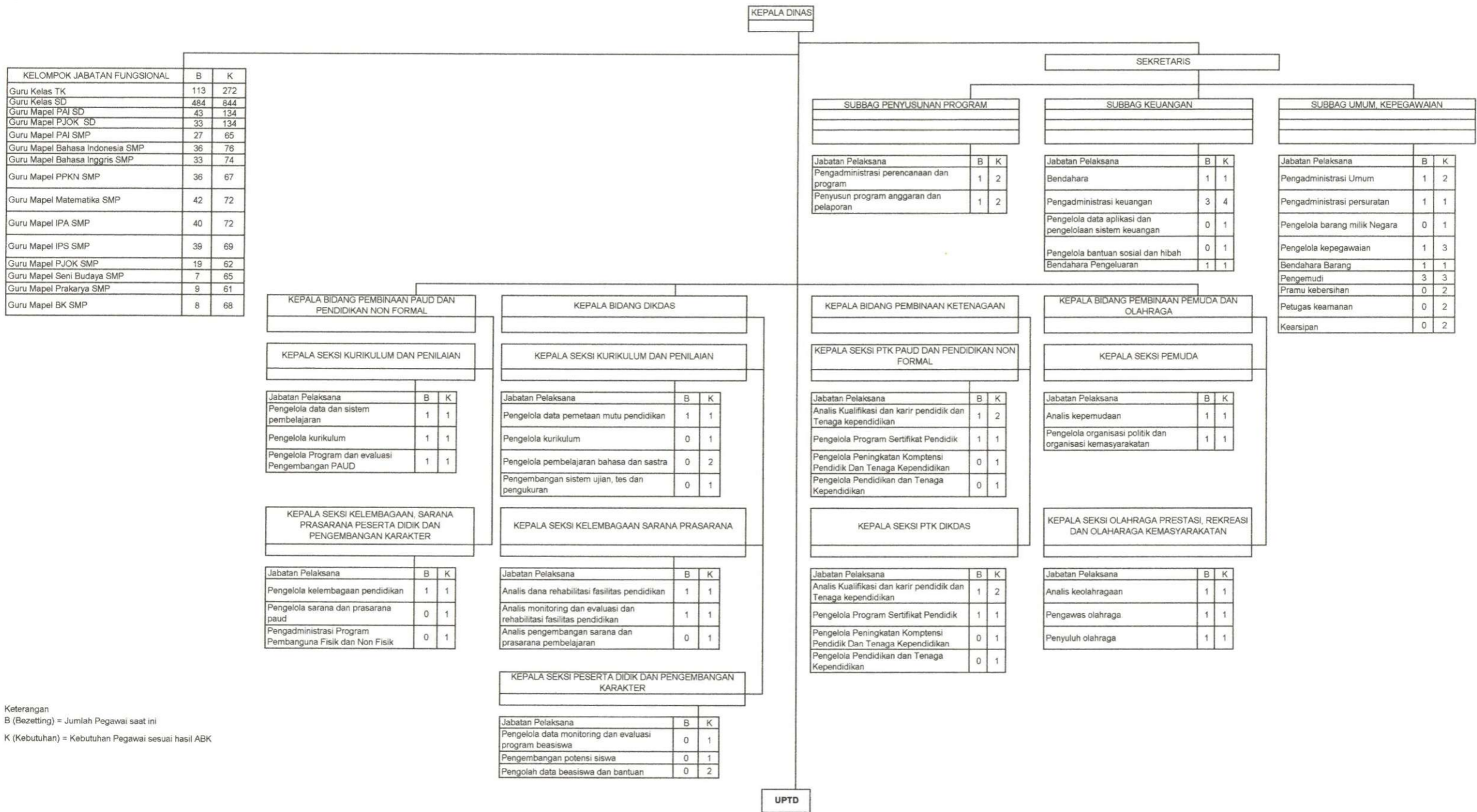
c. PETA JABATAN INSPEKTORAT KABUPATEN BOALEMO



Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

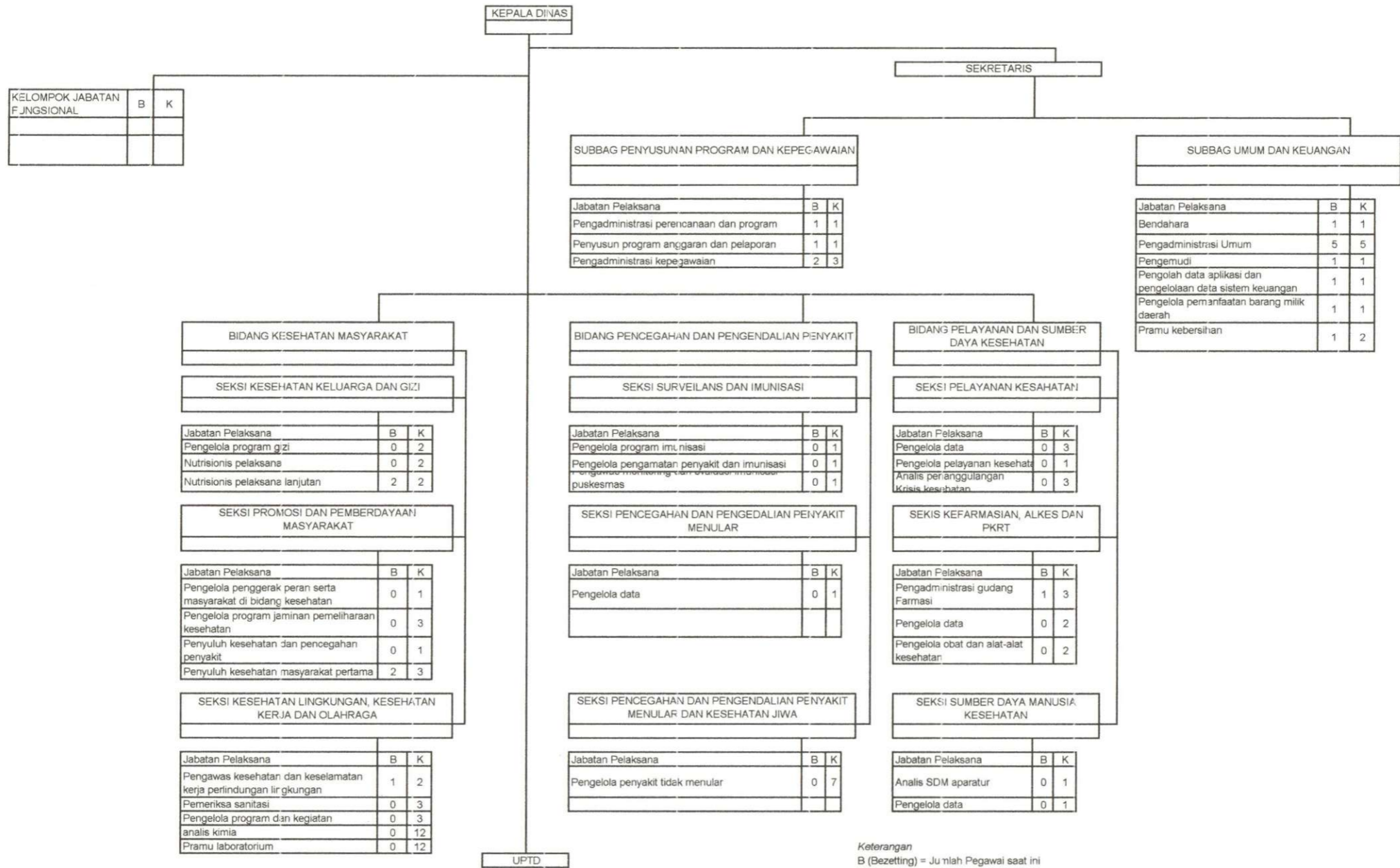
INSPEKTUR	SEKRETARIS	ASST	SEKDA	SEKSI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

d. PETA JABATAN DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOALEMO



KEPALA BIDANG UMUM  
 KEPALA BIDANG KURikulum  
 AGS  
 SEKDA  
 WABUP

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN



Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

ASST. BUN. KABUP. BOALEMO	ASST. BUN. KABUP. BOALEMO	ASST. BUN. KABUP. BOALEMO	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PER/ PERATURAN BUPATI BOALEMO

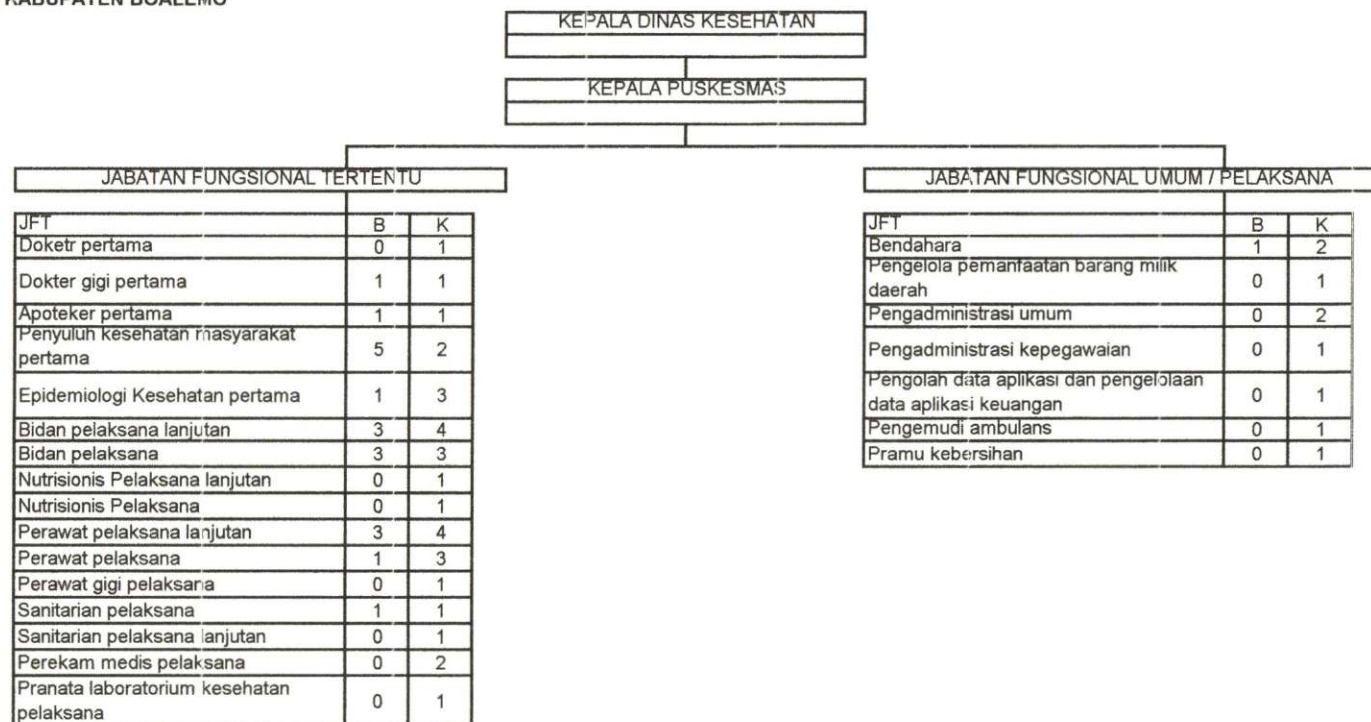
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

1. PETA JABATAN PUSKESMAS BERLIAN KABUPATEN BOALEMO



KABAG HUKUM	DINAS DAN KAMAR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PER/PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

2. PETA JABATAN PUSKESMAS BONGO II KABUPATEN BOALEMO



KABUPATEN BOALEMO  
 DINAS KESEHATAN  
 ASST. SEKDA  
 WATU

LAMPIRAN PEF PERATURAN BUPATI BOALEMO

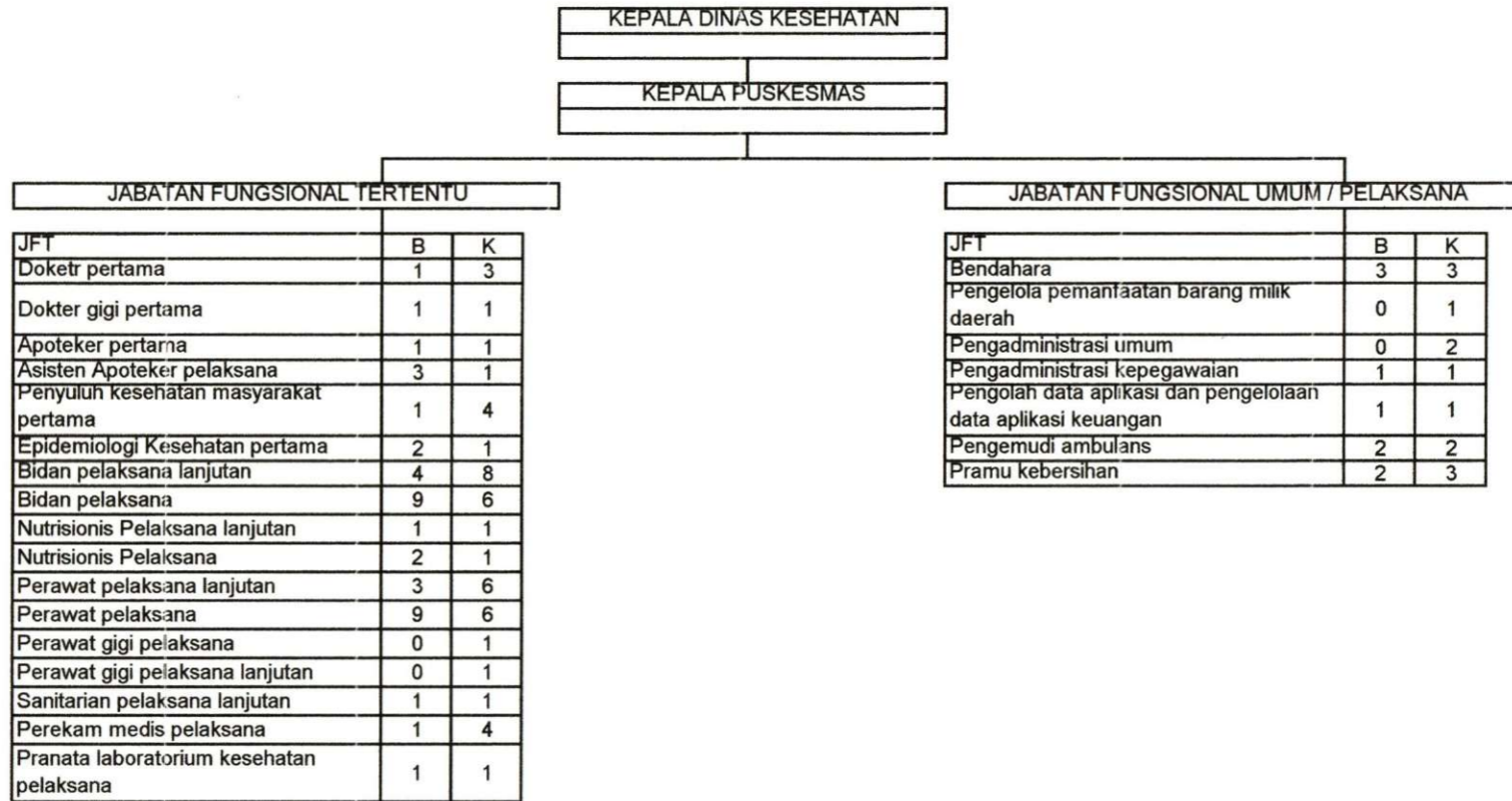
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

3. PETA JABATAN PUSKESMAS BONGO NOL KABUPATEN BOALEMO



KABAG KUKLIM	DINAS/DAMI KANTOR	ASST	SEKDA	WAKIL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN PER PERATURAN BUPATI BOALEMO

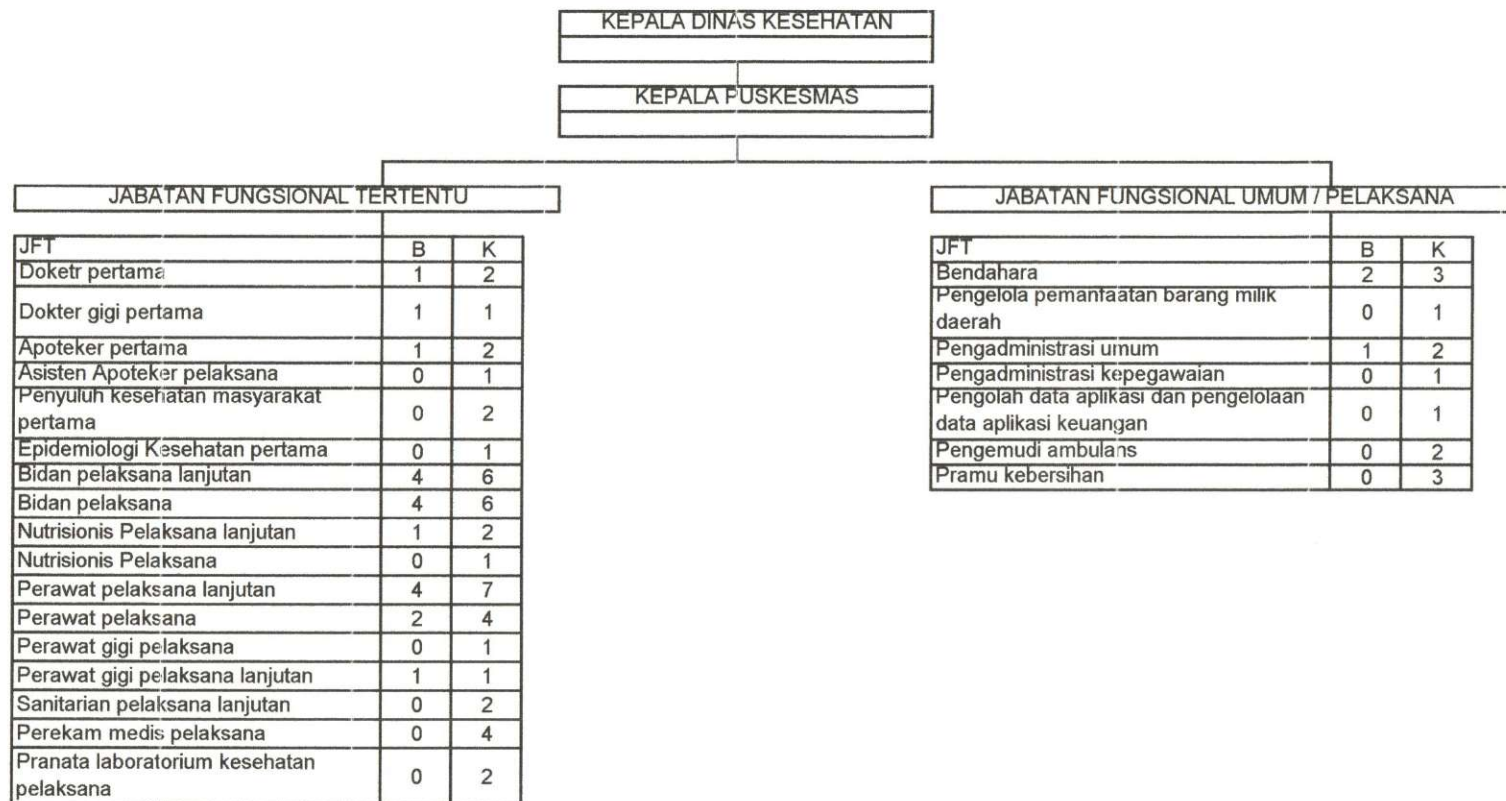
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

4. PETA JABATAN PUSKESMAS BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO



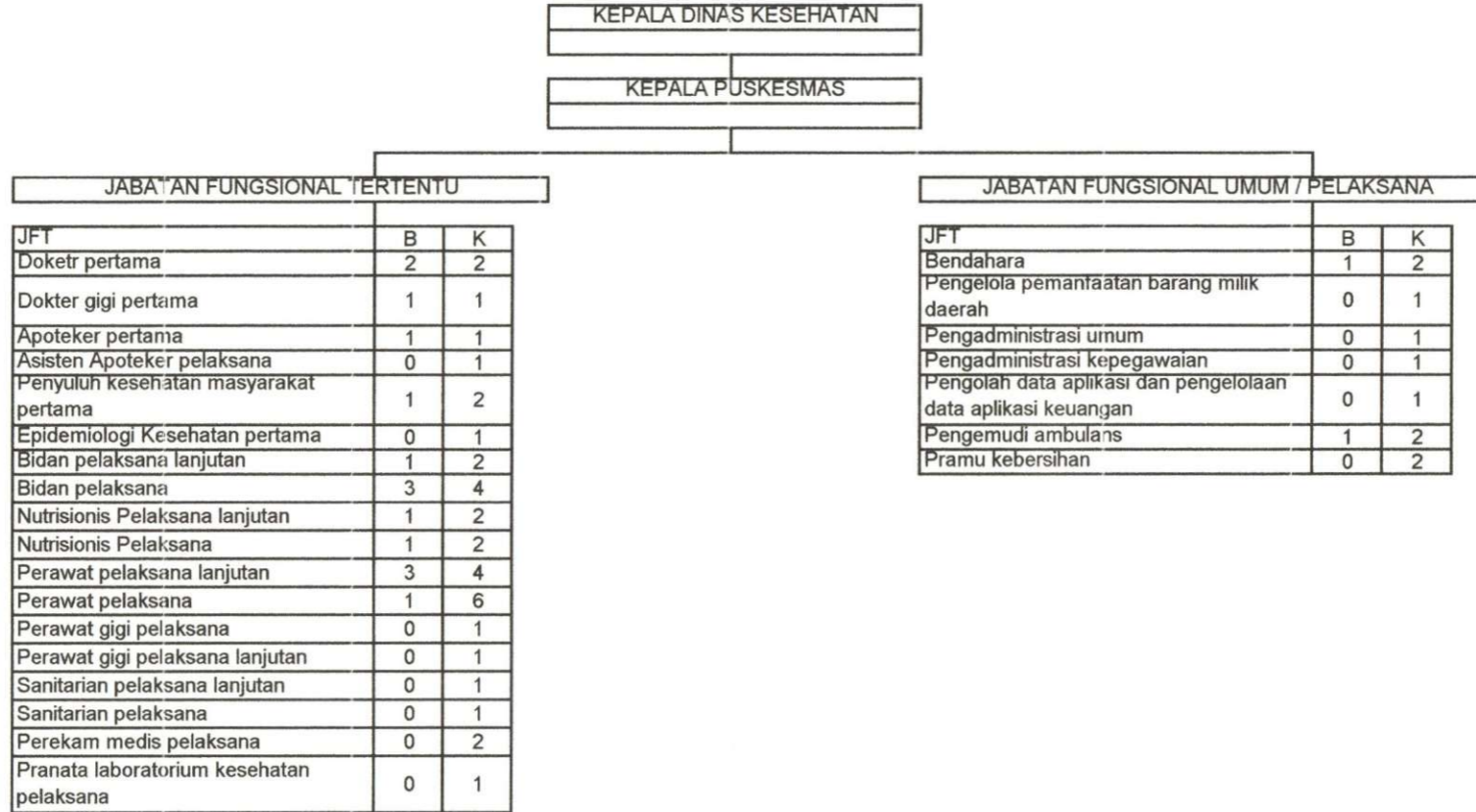
KABAG HUKUM	DINARSI DAH KAWAS	AGS	SEKDA	WADUP
				

LAMPIRAN PEF PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

5. PETA JABATAN PUSKESMAS DULUPI KABUPATEN BOALEMO



SEKDA INKLUSI  
 SEKDA KEMERDEKAAN  
 AD3  
 SEKDA  
 WAFU

LAMPIRAN PERA PERATURAN BUPATI BOALEMO

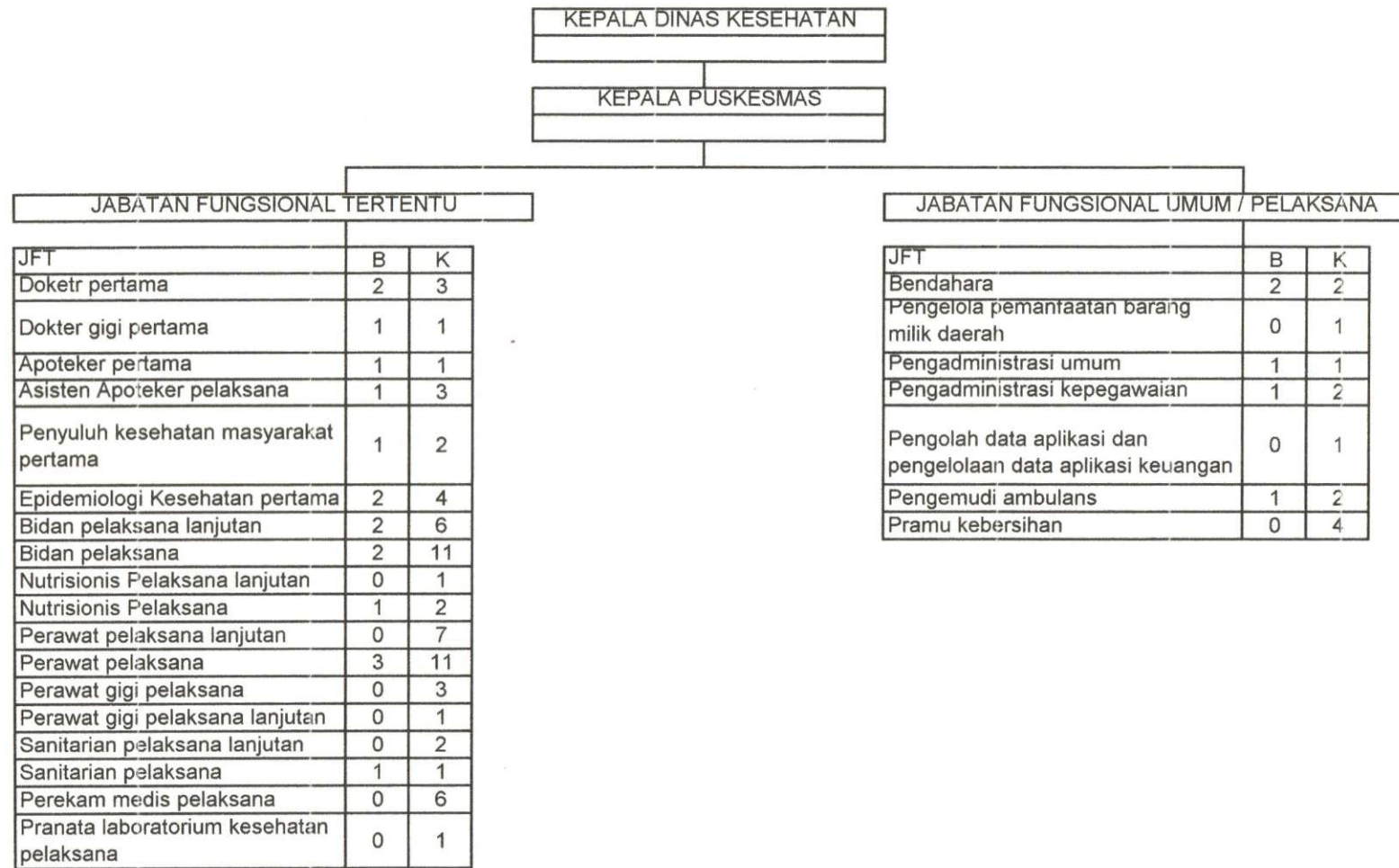
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

6. PETA JABATAN PUSKESMAS MANANGGU KABUPATEN BOALEMO



KABAG HUKUM	DNAB/AD/PAI KASUB	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

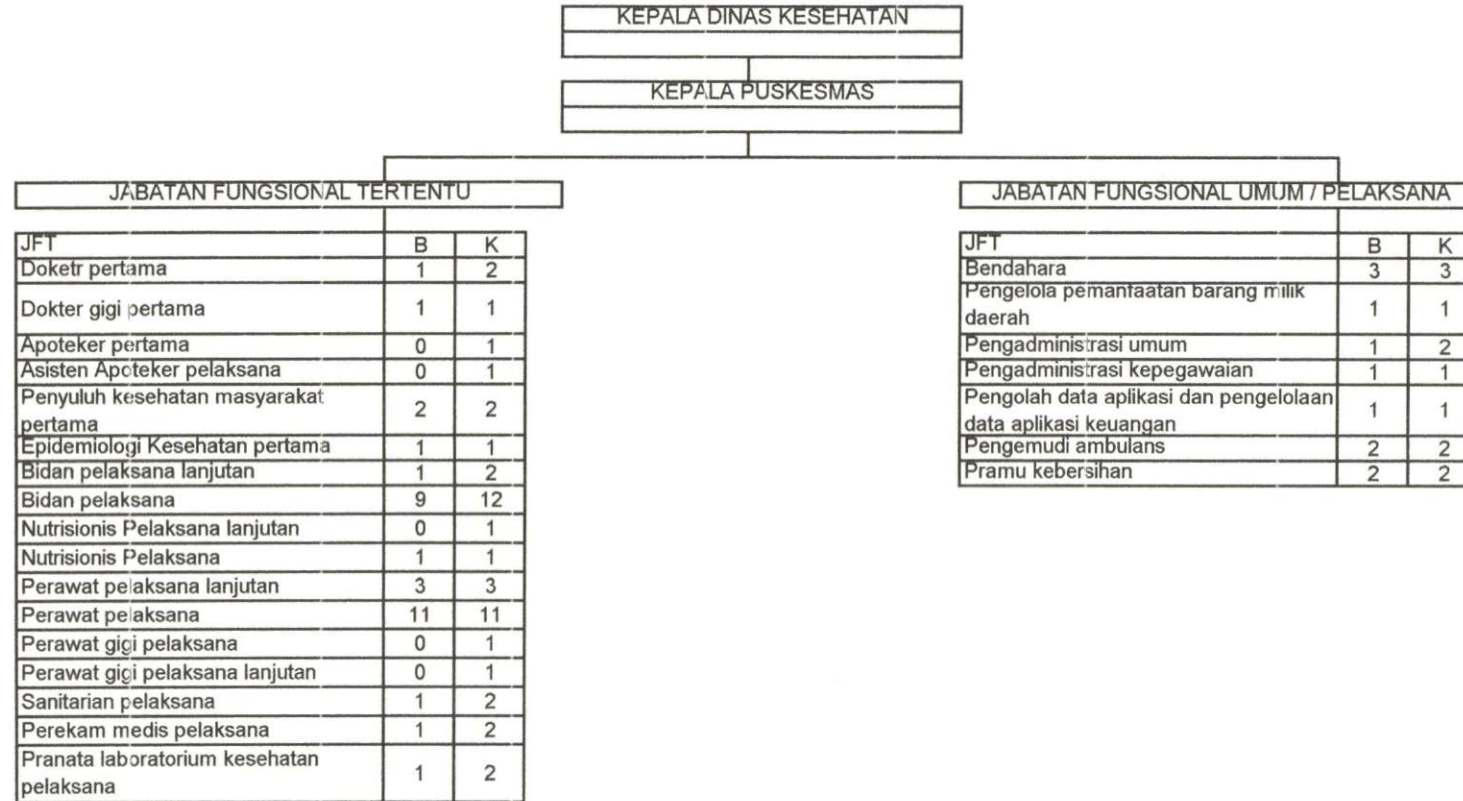
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

7. PETA JABATAN PUSKESMAS PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO



BUNDA BUNLU  
 DOKUMEN KULTUR  
 ASB  
 SEKDA  
 WABUP

LAMPIRAN PE PERATURAN BUPATI BOALEMO

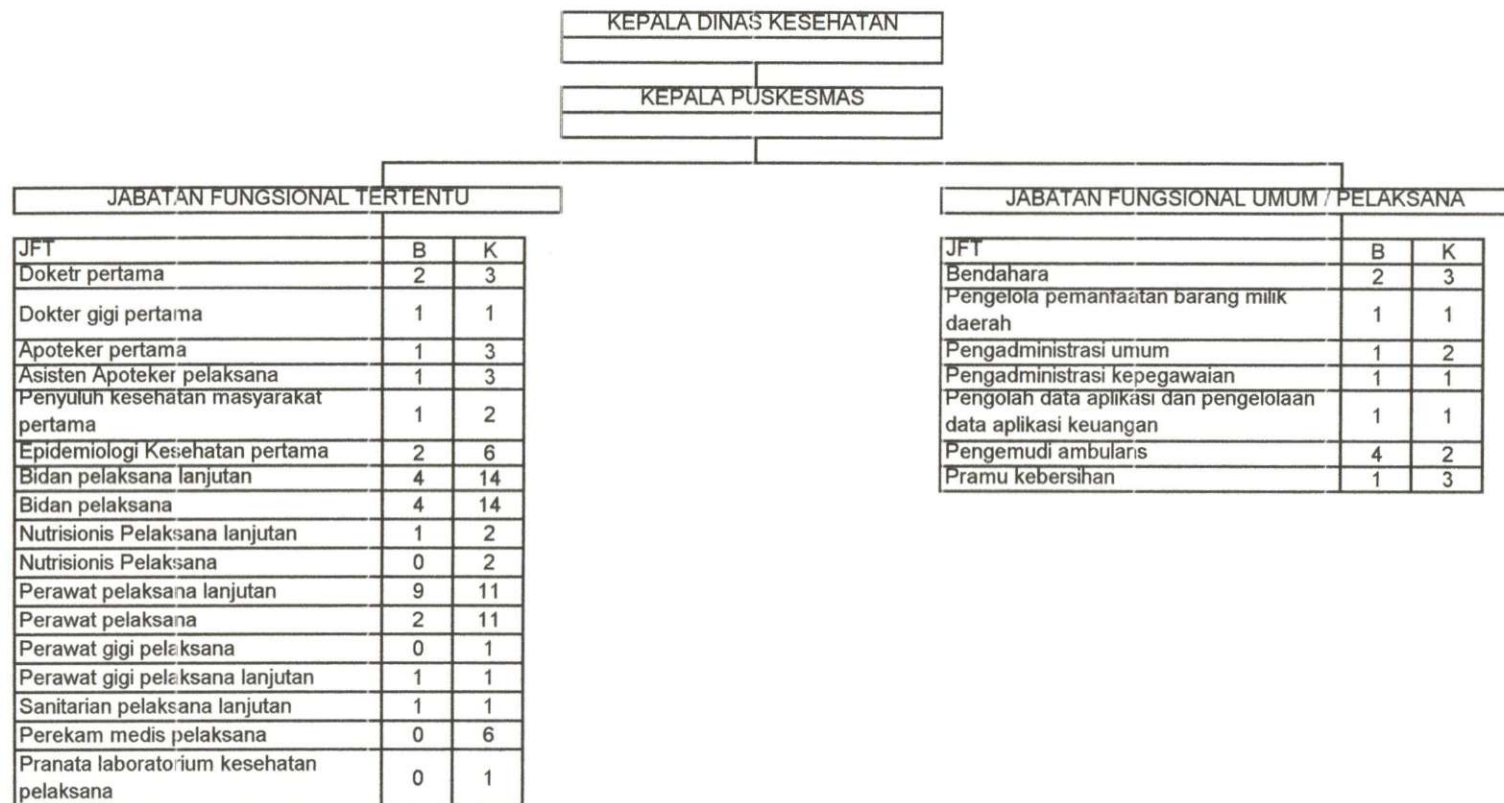
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

8. PETA JABATAN PUSKESMAS PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO



KABAG KUKUM	DINAS DINAS KUKUM	ASS	SEKDA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PEF PERATURAN BUPATI BOALEMO

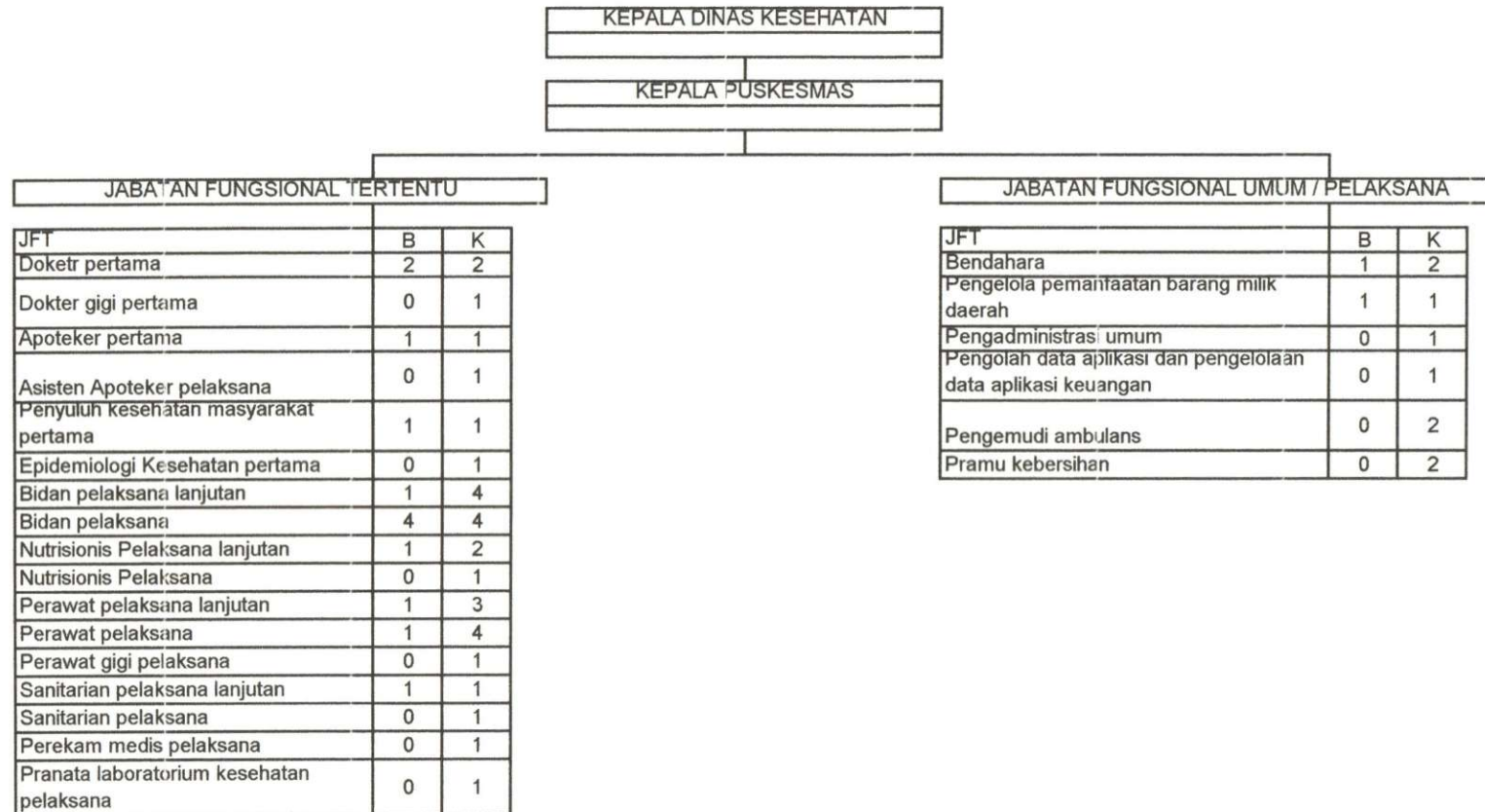
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

9. PETA JABATAN PUSKESMAS PANGI KABUPATEN BOALEMO



KABAG. IKUM    DINASDAN. IKUM    ASB    SEKDA    MALIK

*(Handwritten signatures and stamps)*

LAMPIRAN PER/ PERATURAN BUPATI BOALEMO

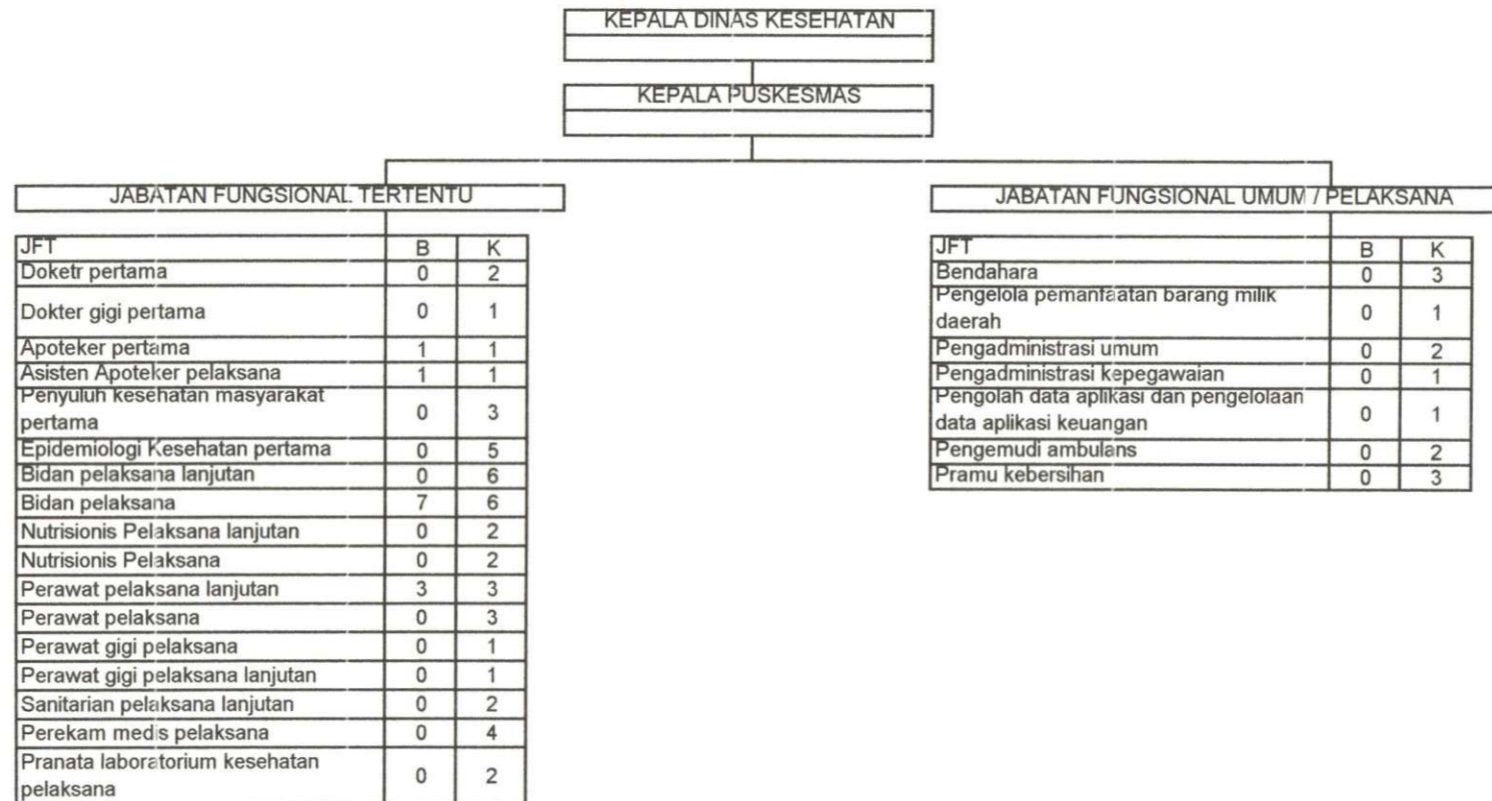
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

10. PETA JABATAN PUSKESMAS SARI TANI KABUPATEN BOALEMO



KABAG SEKUM	DINAS/HEADMI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PER/ PERATURAN BUPATI BOALEMO

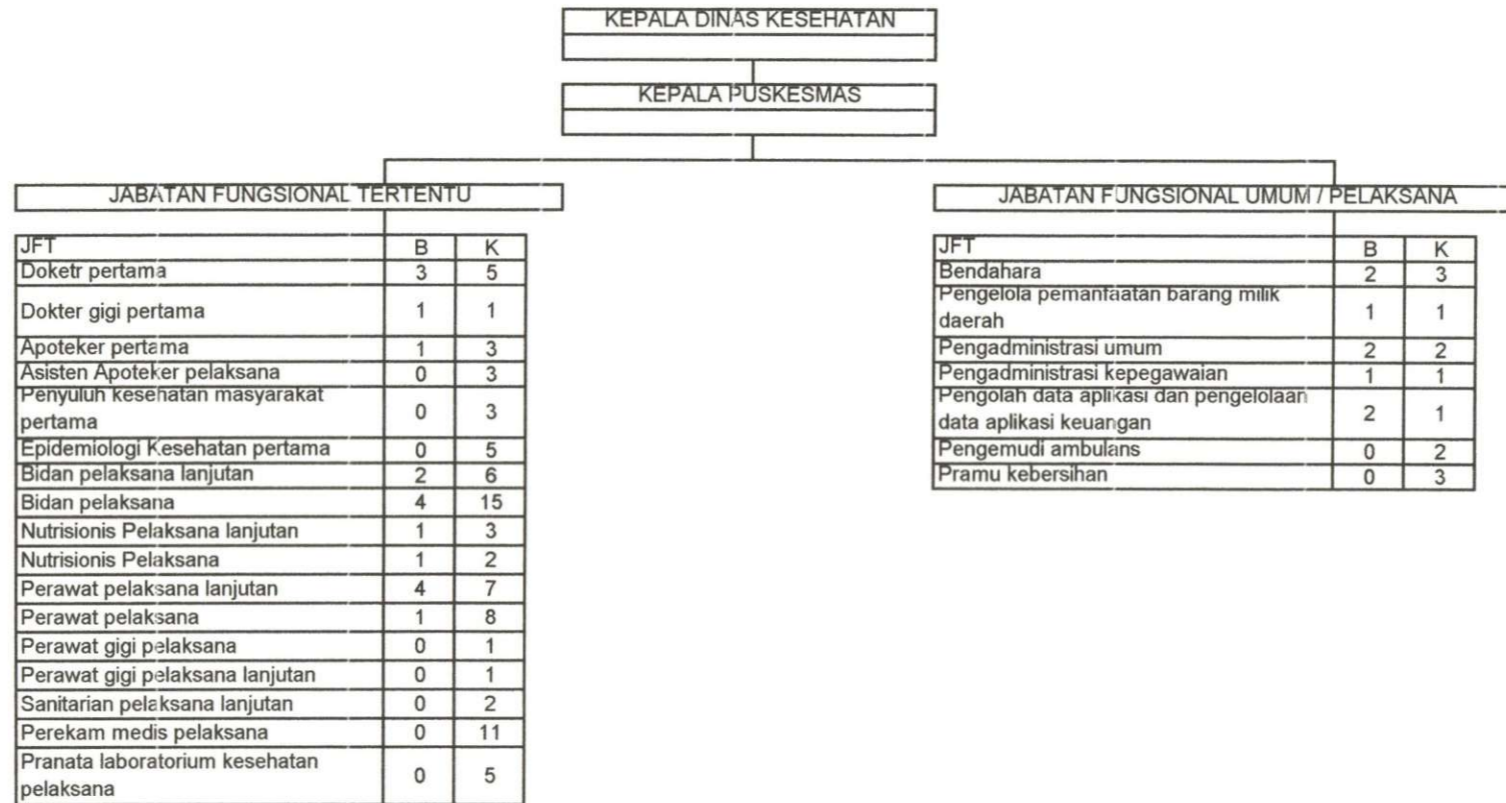
NOMOR : 20 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS KESEHATAN

11. PETA JABATAN PUSKESMAS TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

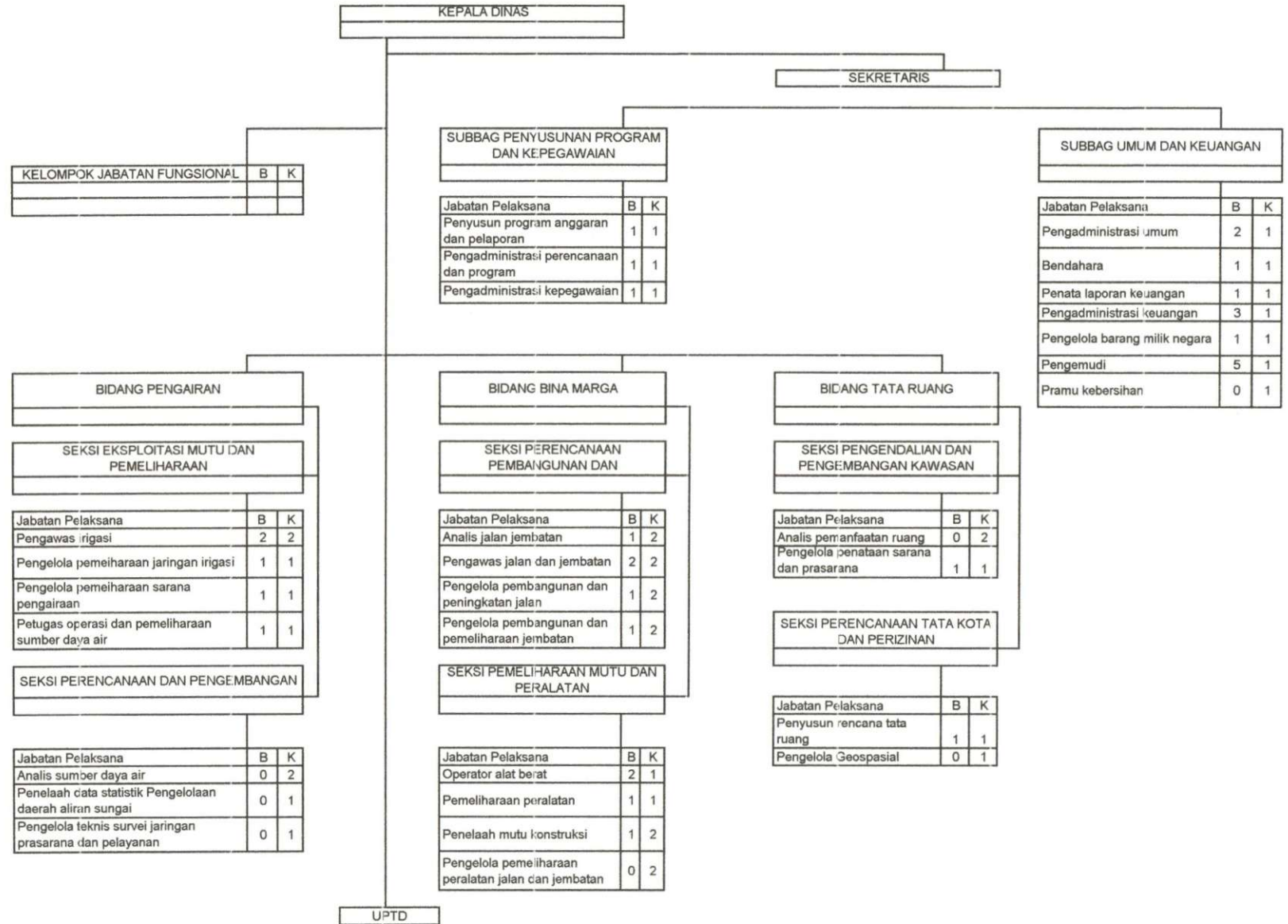


KABAG HUKUM	DINASBADA KABUP	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	--------------------	-----	-------	-------



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

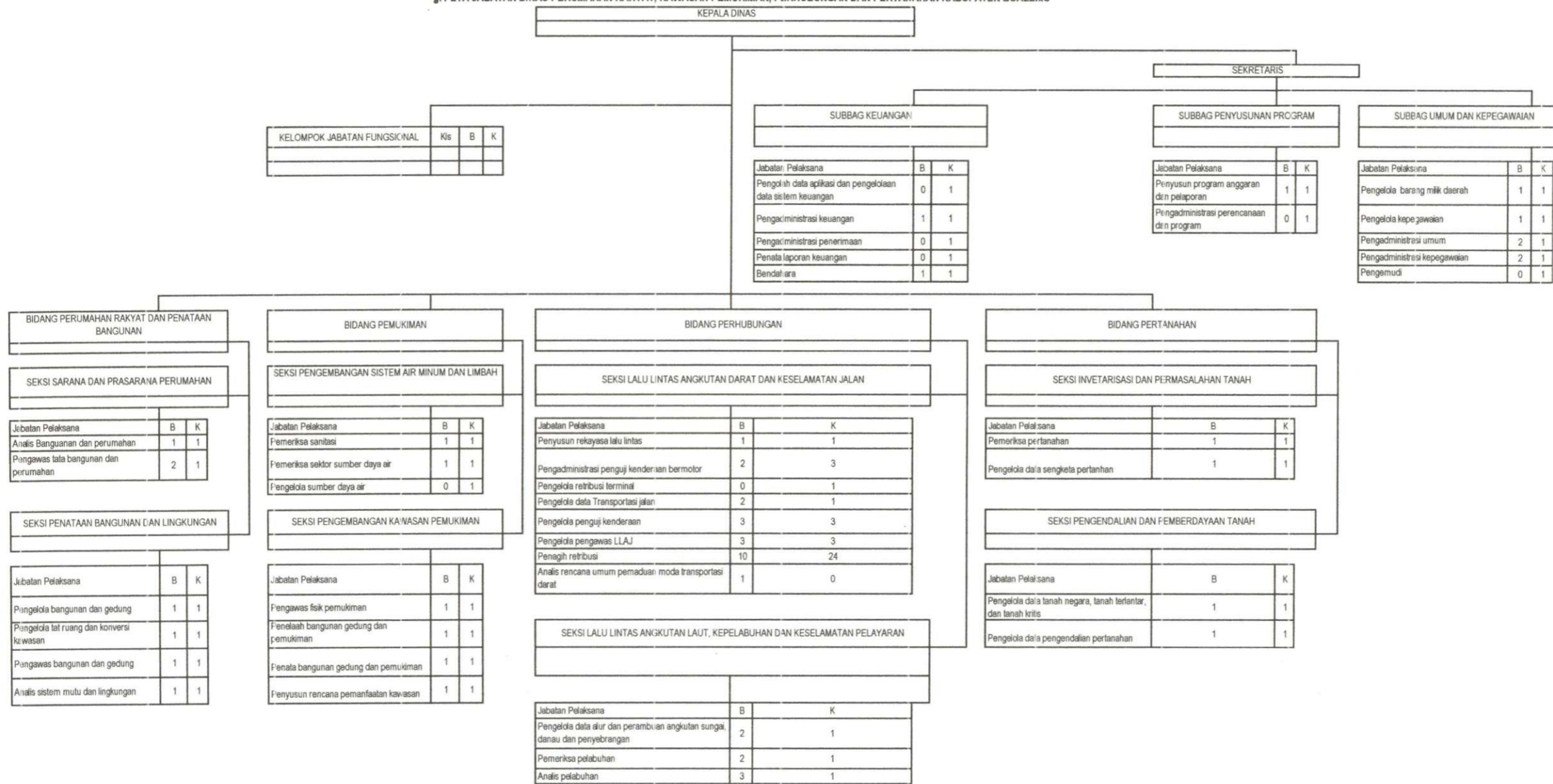
f. PETA JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BOALEMO



KABAG KUKUWA    DIRASBADAAN KANJUR    ASS    SEKDA    WABUP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

g. PETA JABATAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOALEMO



KABUPATEN BOALEMO  
 DINAS DAFTAR DAN KAWASAN  
 ASS  
 SEKDA  
 WABUP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

h. PETA JABATAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOALEMO

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	B	K
Polisi pamong praja (Poll PP) Pelaksana Pemula	0	20
Polisi pamong praja (Poll PP) Pelaksana lanjutan	0	20
Polisi pamong praja (Poll PP) Penyelia	0	20
Polisi pamong praja (Poll PP) Pertama	0	20
Polisi pamong praja (Poll PP) Muda	0	20
Polisi pamong praja (Poll PP) Madya	0	20

SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

Jabatan Pelaksana	B	K
Pengadministrasi perencanaan dan program	0	1
Penyusun program anggaran dan pelaporan	0	1
Pengadministrasi kepegawaian	0	1

SUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN

Jabatan Pelaksana	B	K
Pengadministrasi umum	1	1
Pengelola pemanfaatan barang milik daerah	1	1
Bendahara	1	1
Pengadministrasi keuangan	0	1
Pengolah data aplikasi dan pengelolaan data sistem keuangan	1	1
Pengemudi	0	3
Pramu kebersihan	0	1

KEPALA BIDANG PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN TRANTIBUM

KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN PERDA

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis intelejen	0	7
Penyuluh masyarakat	0	7

KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIK

Jabatan Pelaksana	B	K
Pengolah data penyidikan dan barang hasil penindakan	1	1
Petugas penindakan	0	7
Analisis penyidik pegawai negeri sipil	1	7

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Jabatan Pelaksana	B	K
Pengelola data keamanan dan ketertiban	0	1
Penyusun rencana pencegahan dan penindakan pelanggaran	0	1

KEPALA BIDANG OPERASIONAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGEDALIAN

Jabatan Pelaksana	B	K
Pengelola pengendalian dan operasional	0	1
Pranata perlindungan masyarakat	13	200

KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT DAN PELATIHAN

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis masyarakat	0	1
Penyusun teknis pelatihan fungsional bagi aparaturnon dan non aparaturnon	0	1

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

KEPALA SEKSI PENCEGAHAN

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis kebakaran	0	1
Pengelola data pencegahan dan monitoring	0	1

KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN

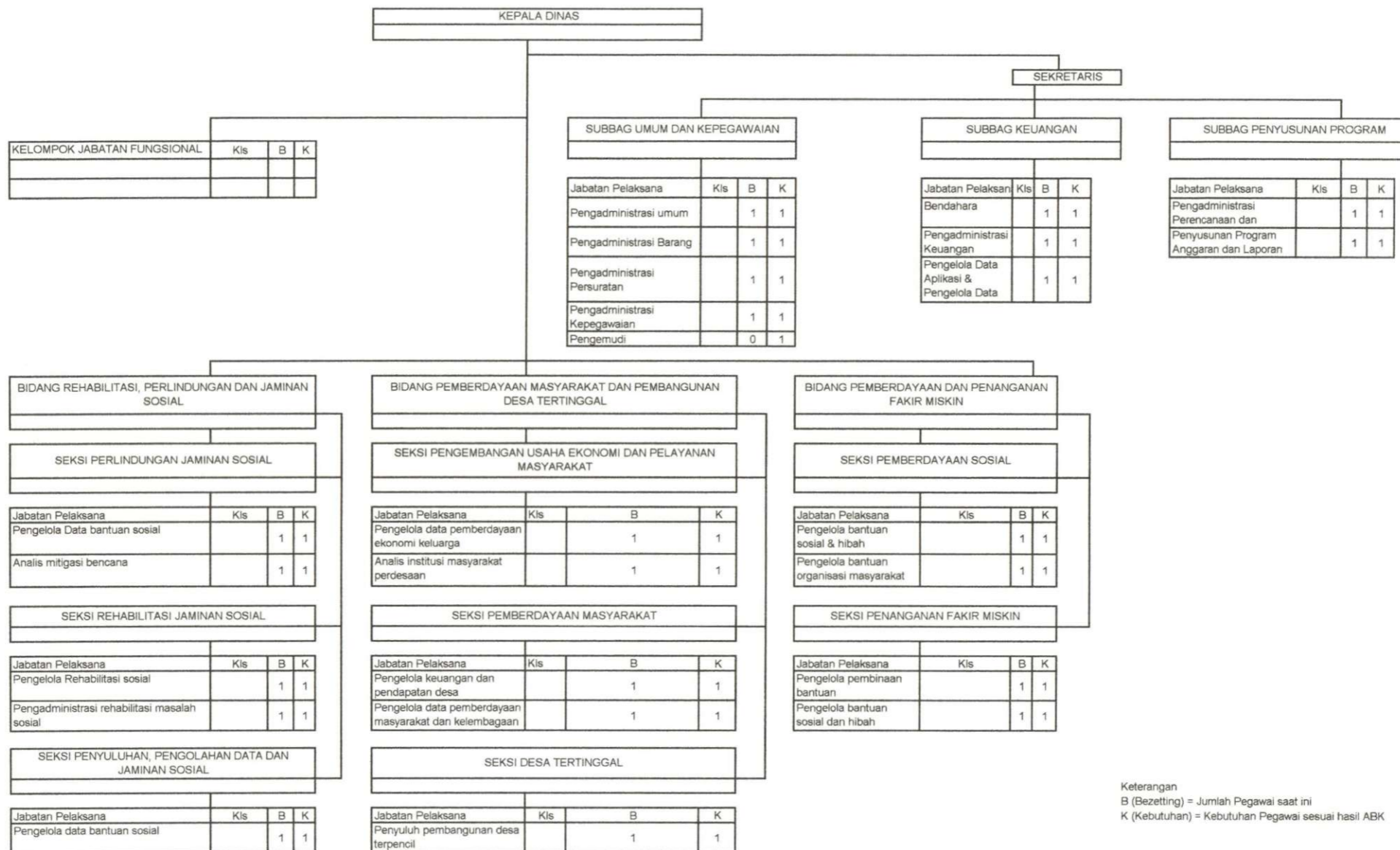
Jabatan Pelaksana	B	K
Pranata pemadam kebakaran	6	30
Pengemudi mobil pemadam kebakaran	0	4

KEPALA SEKSI REHABILITASI

Jabatan Pelaksana	B	K
Analisis resosialisasi dan rehabilitasi	0	1
Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan sosial	0	1

KABAG HUKUM  
 DINASBADAN HUKUM  
 ASS  
 SEKDA  
 WADUP

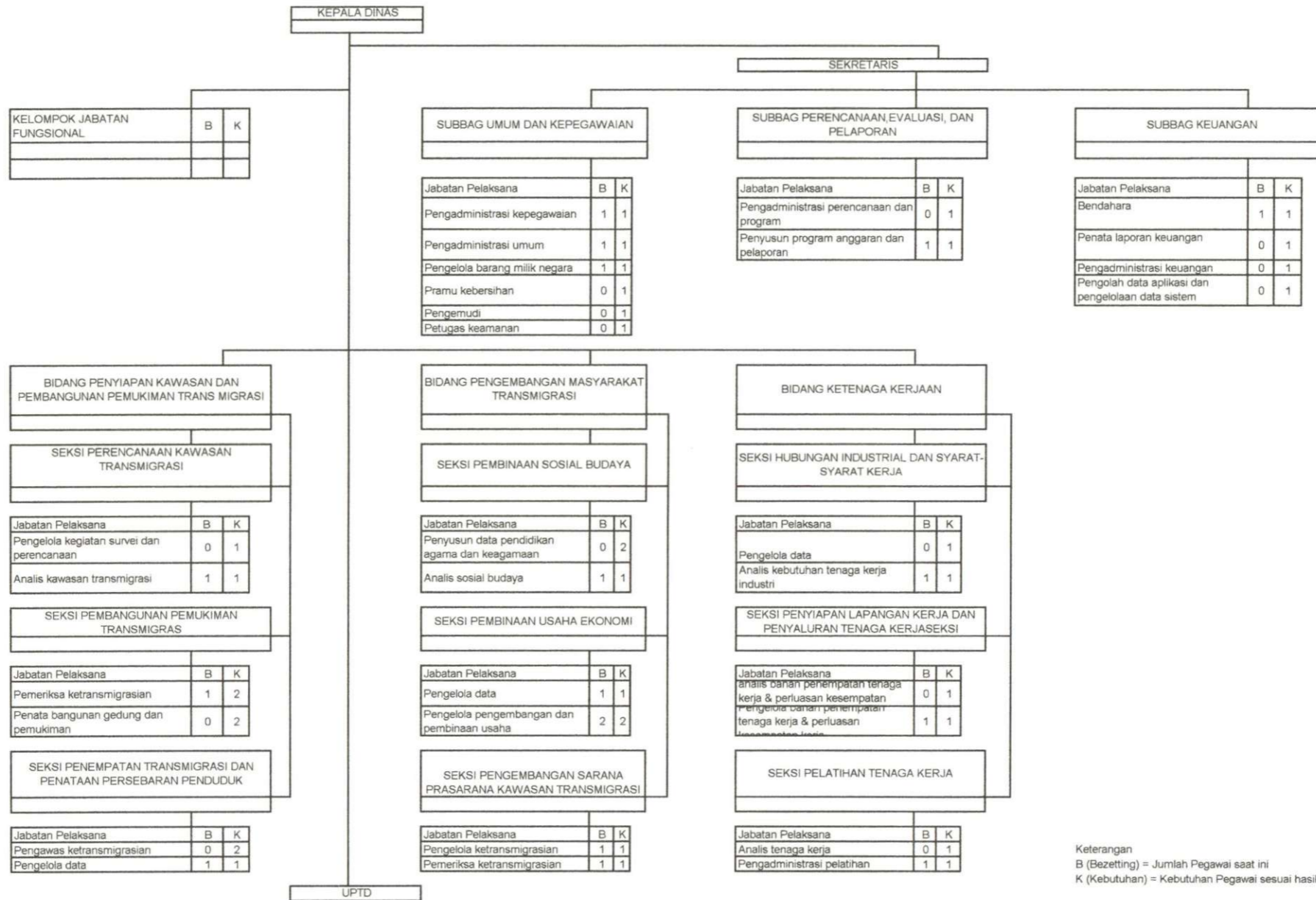
I. PETA JABATAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOALEMO



Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABAG HUKUM    DINAS/DAN KANTOR    ASS    SEKDA    WABUP  
 F    A    R    A    U

j. PETA JABATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOALEMO

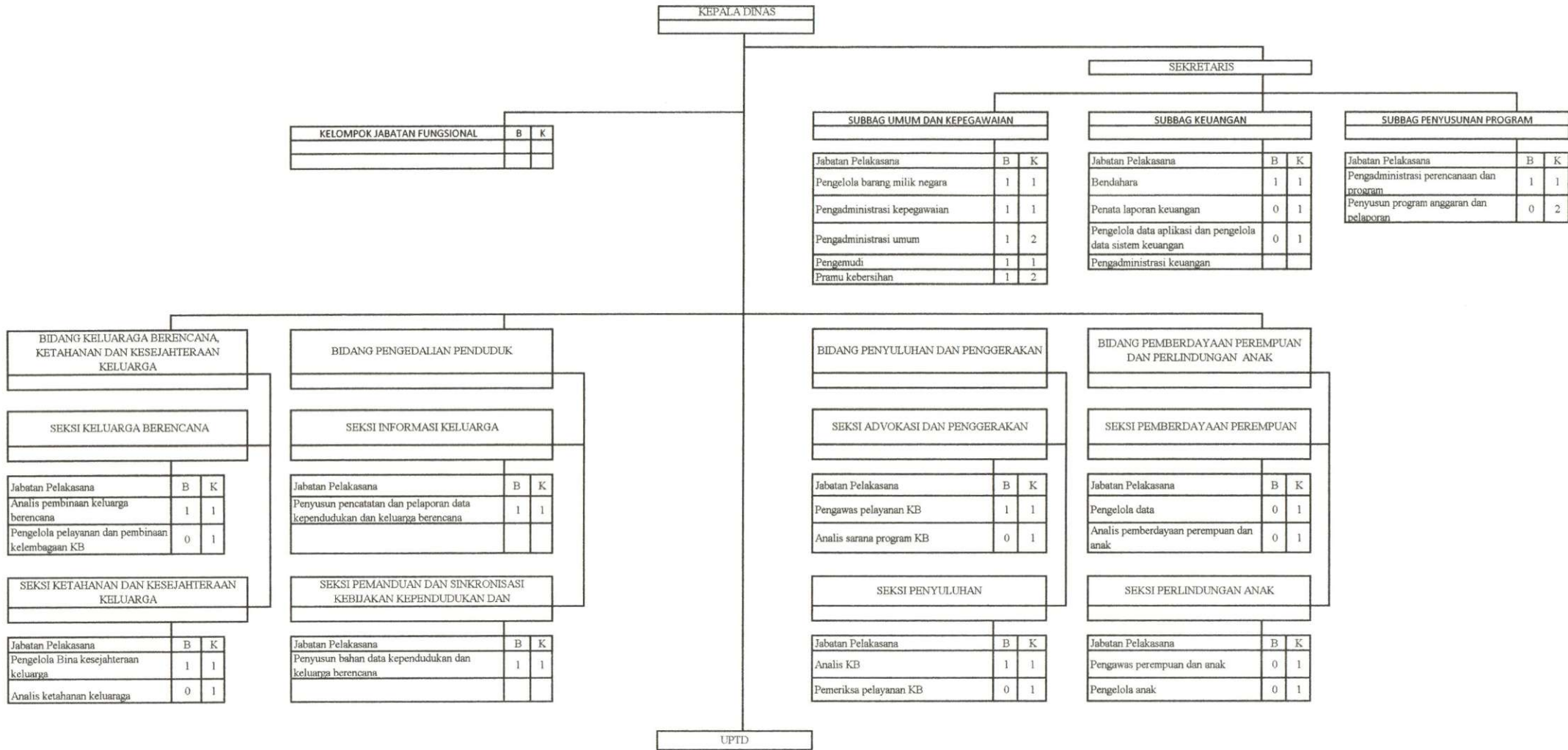


Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABAG HUKUM	DINAS/DAK KOTOR	A/S	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

e. PETA JABATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOALEMO

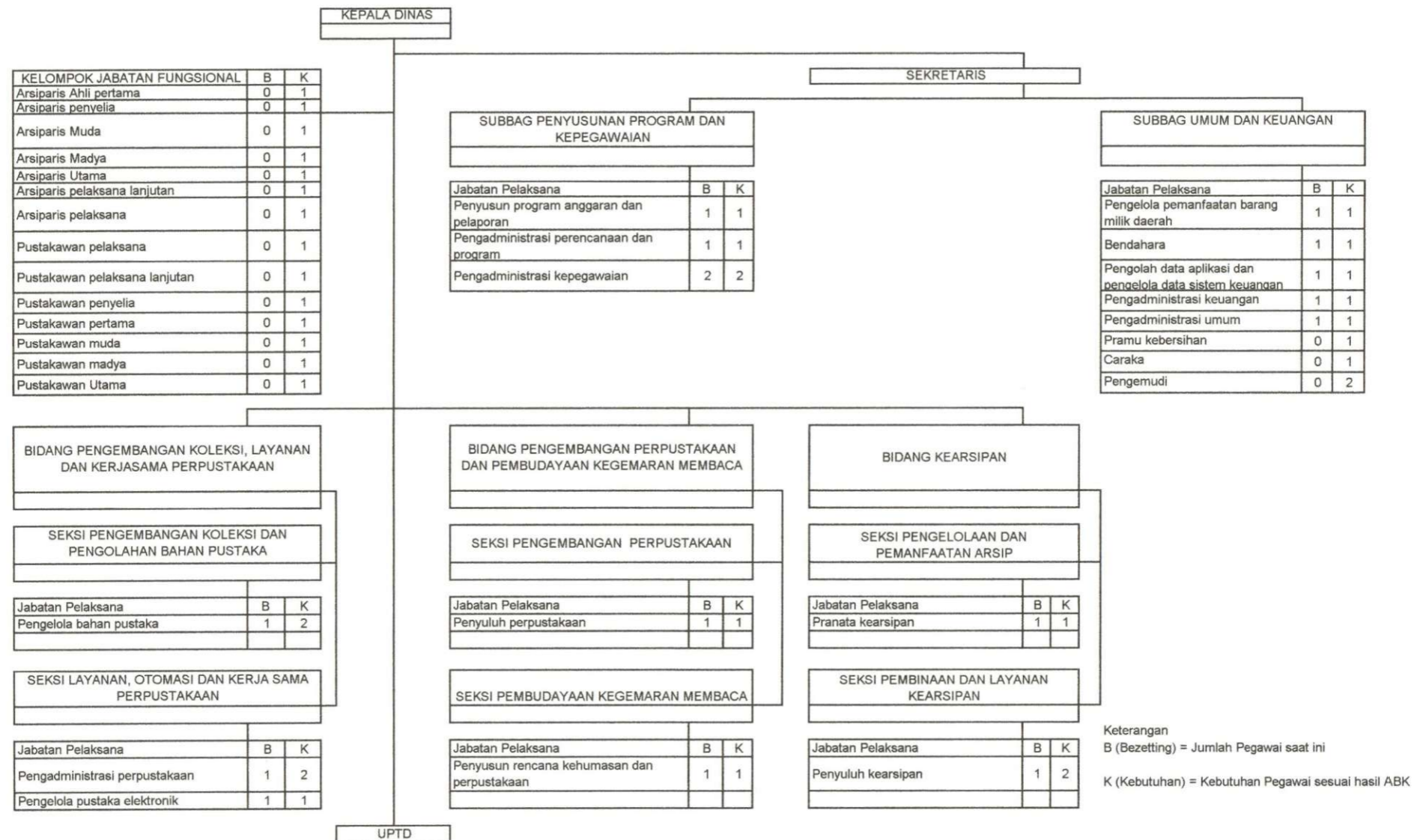


Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

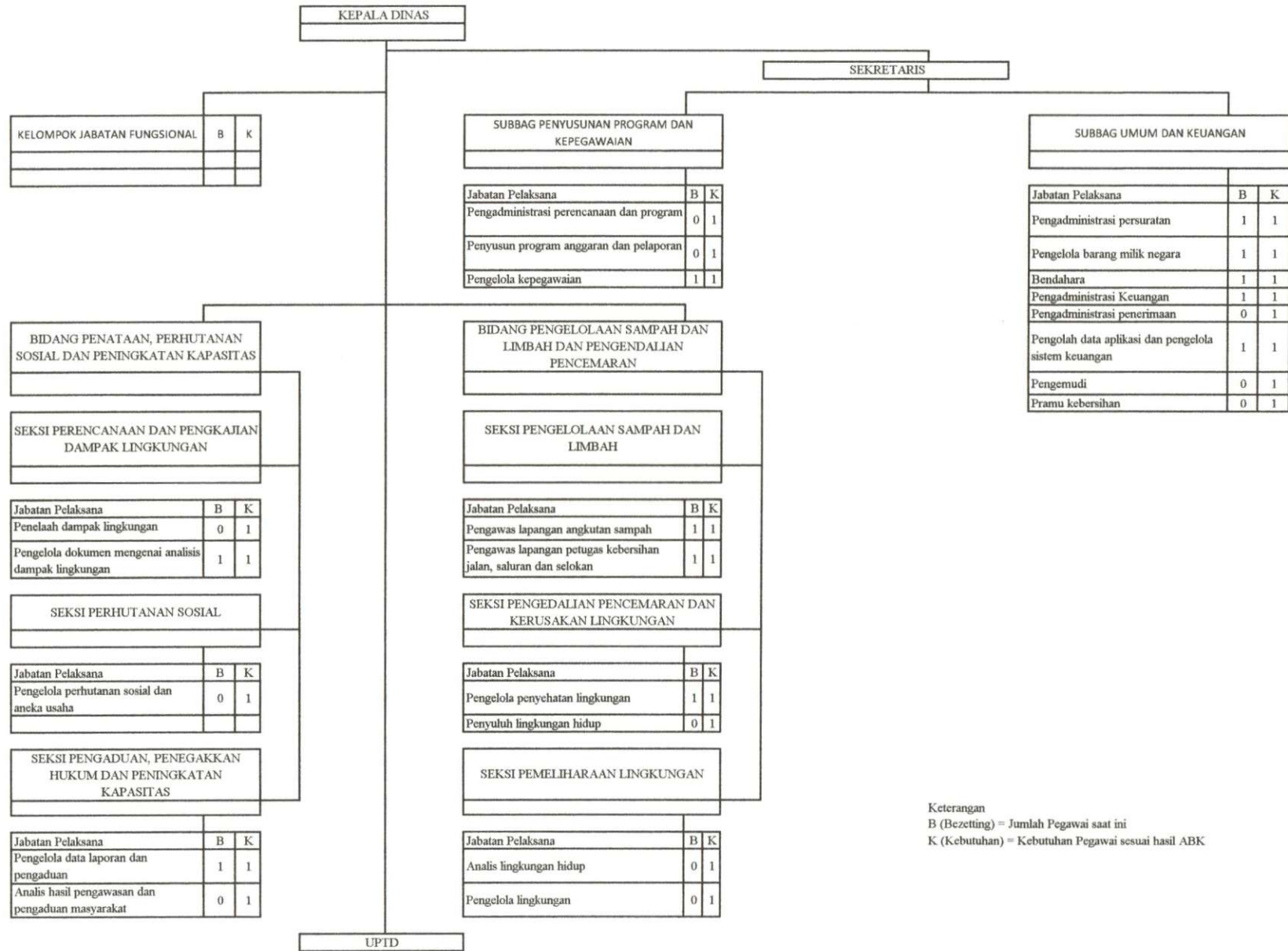
I. PETA JABATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BOALEMO



KEASAS  
 DIRAGADAI  
 ASB  
 SEKDA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

m. PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOALEMO



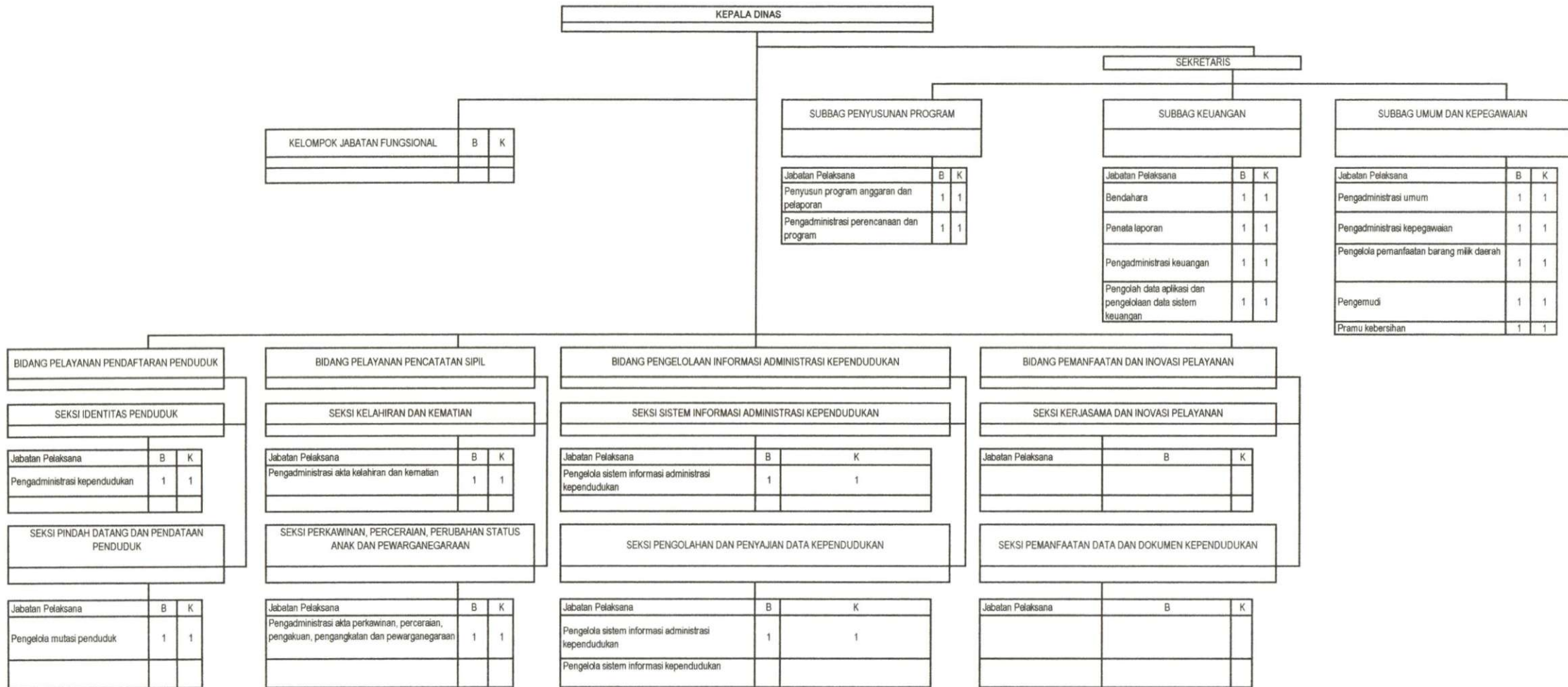
Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABAG HUKUM	DISASIHADEN MANTOR	AGS	SEKDA	WAE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

n. PETA JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOALEMO



Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABAG. HUKUM  
 K. A.  
 ASB  
 SEKDA  
 WABUP

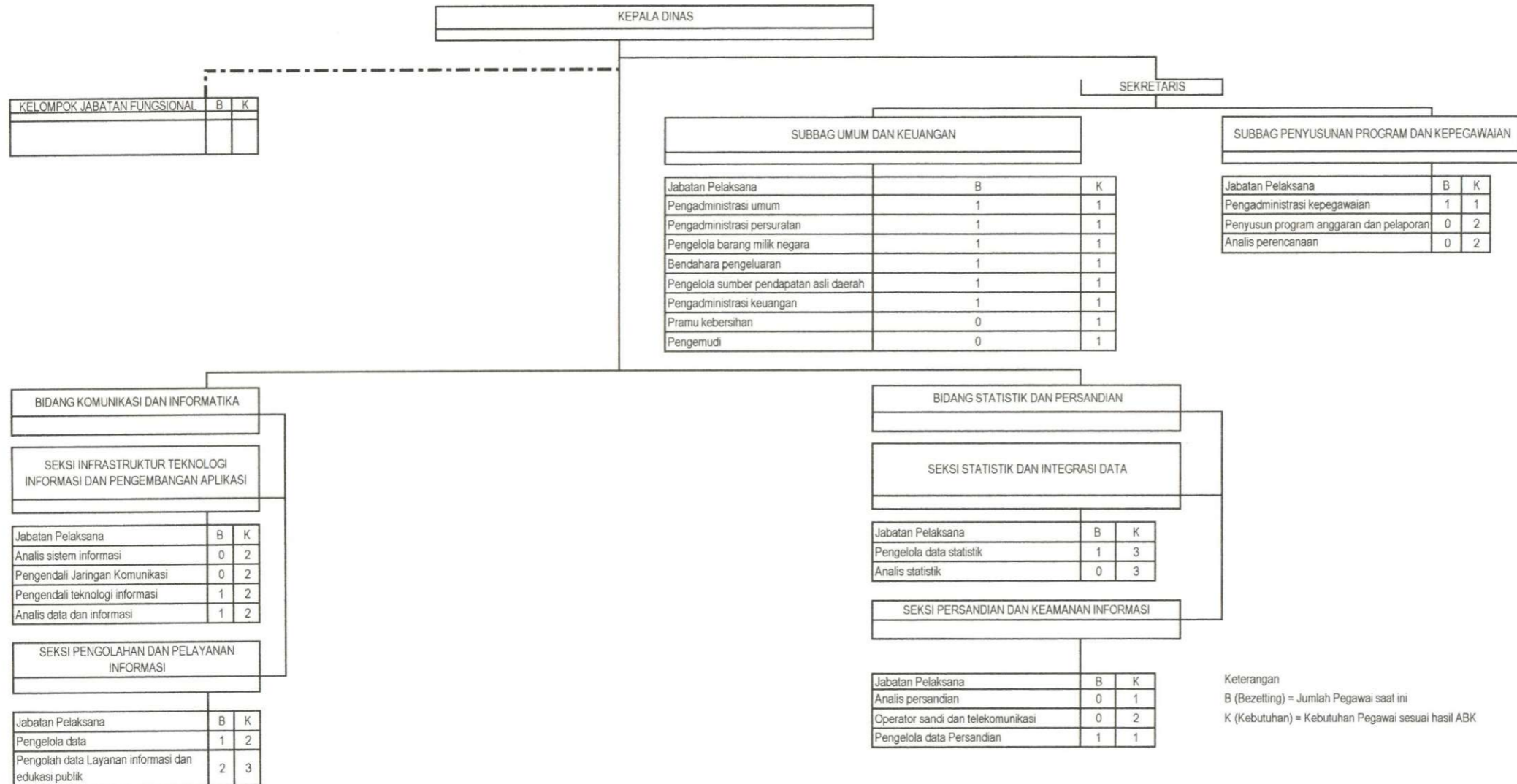
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

o. PETA JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BOALEMO



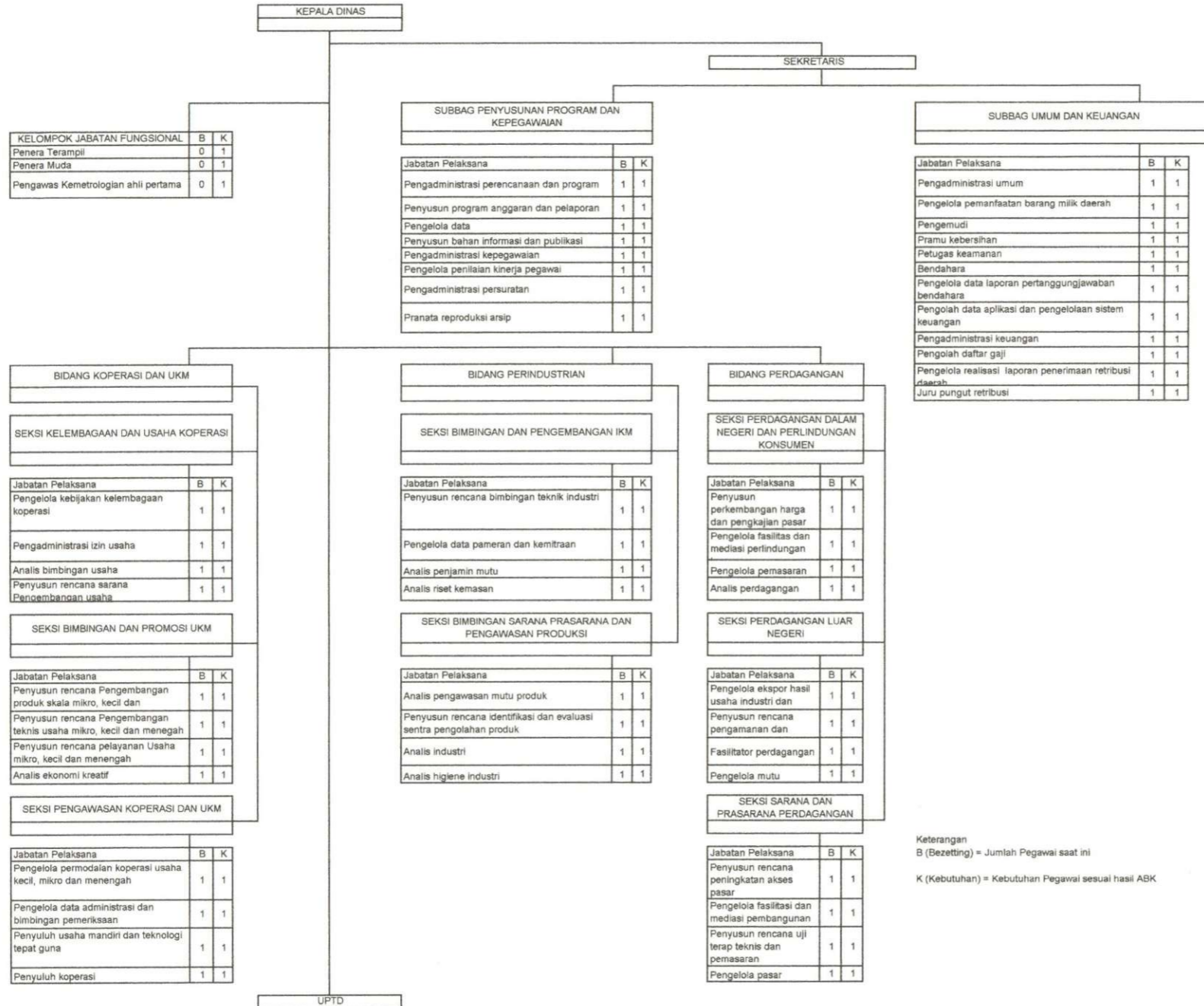
Keterangan

B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



p. PETA JABATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECILI MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

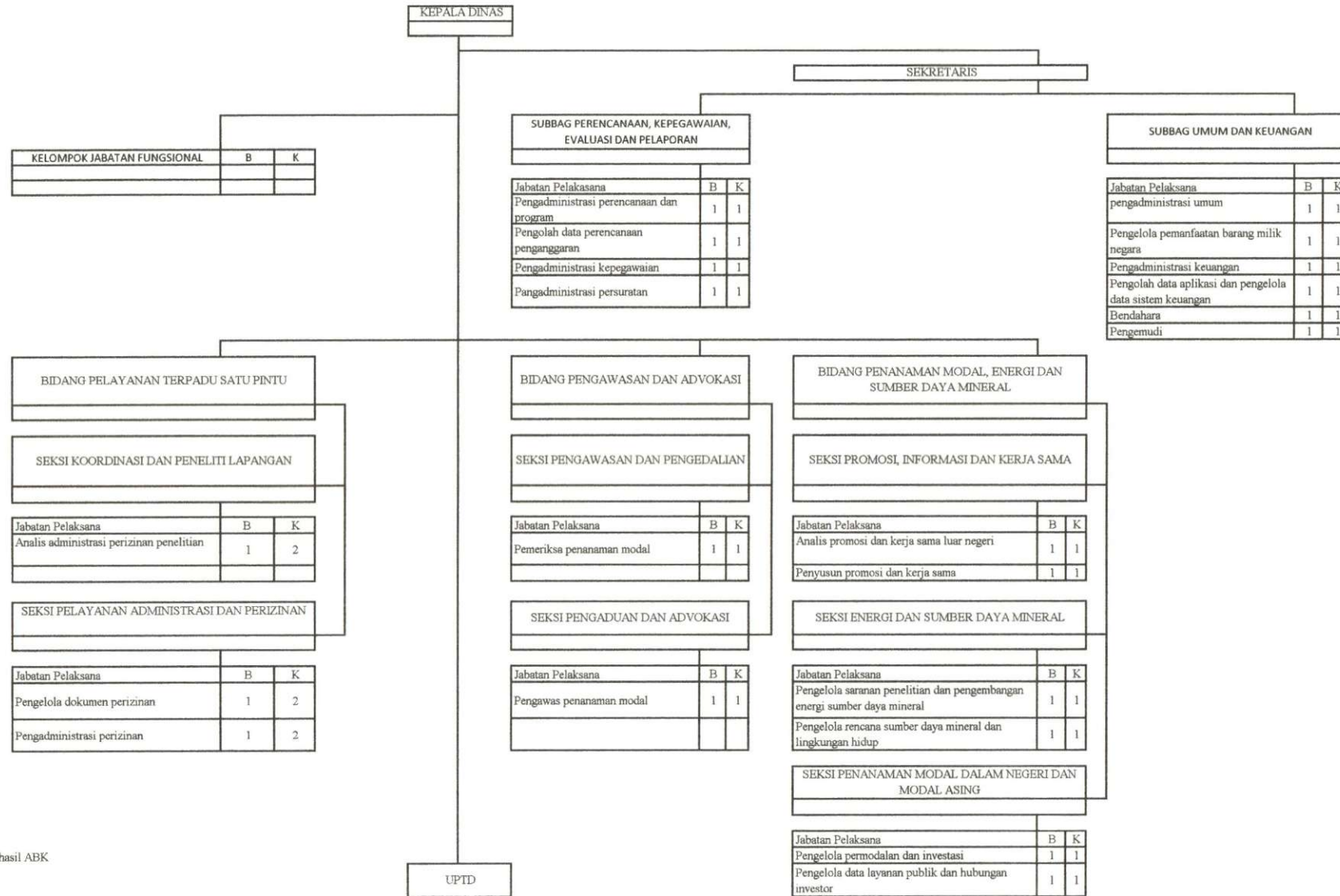


Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

q. PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOALEMO

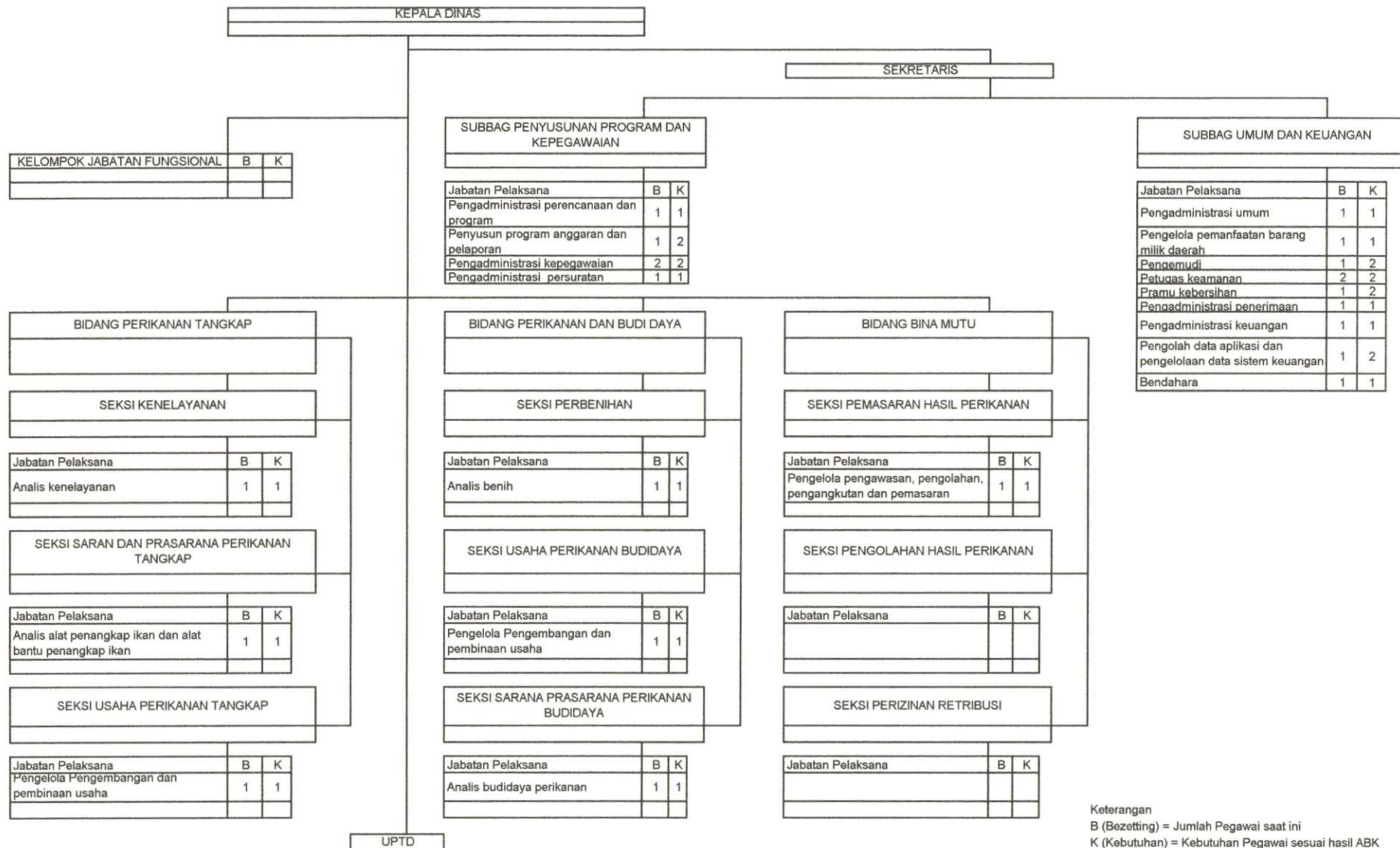


Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

r. PETA JABATAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BOALEMO

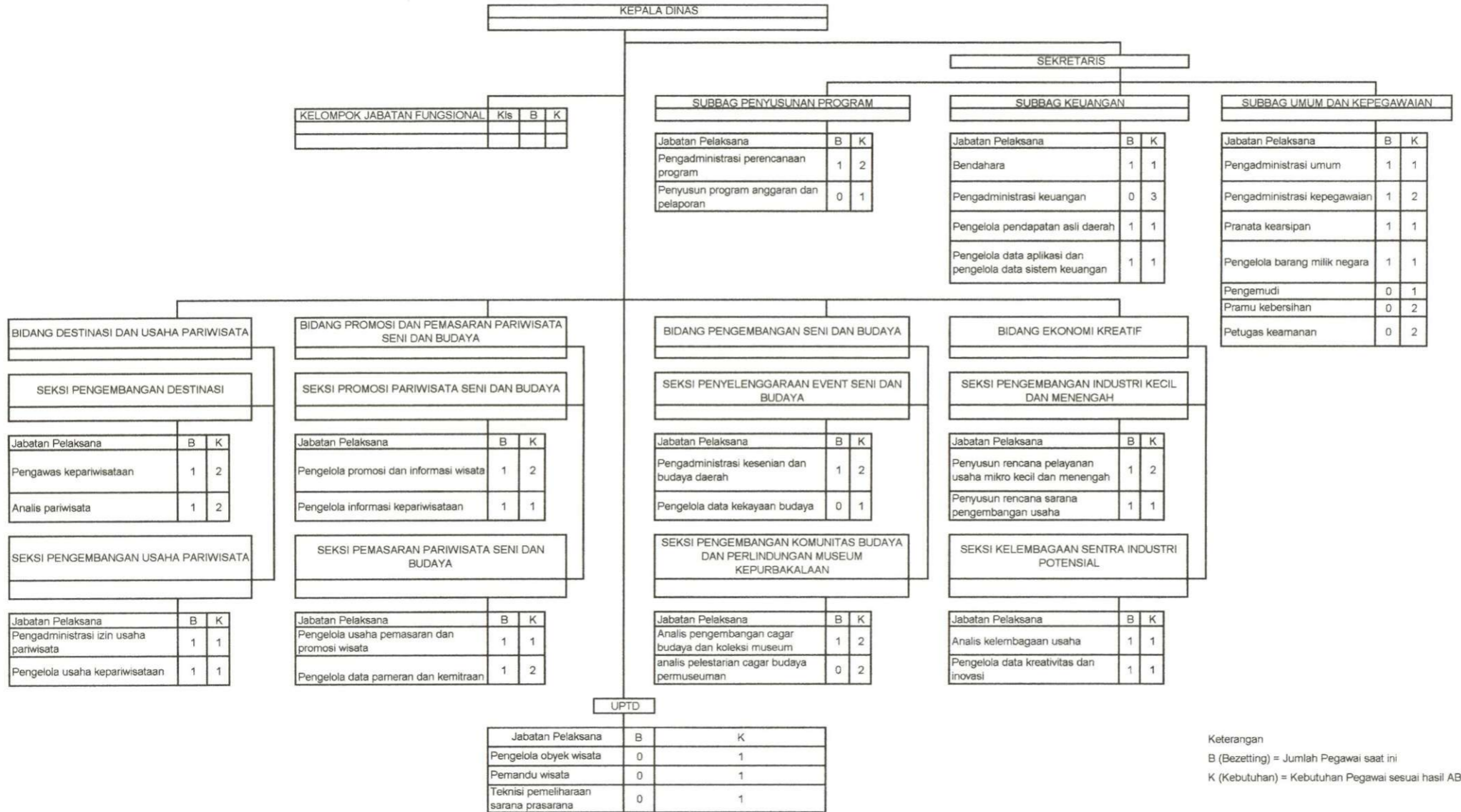


Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

1 1 1 1 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

s. PETA JABATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOALEMO



Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

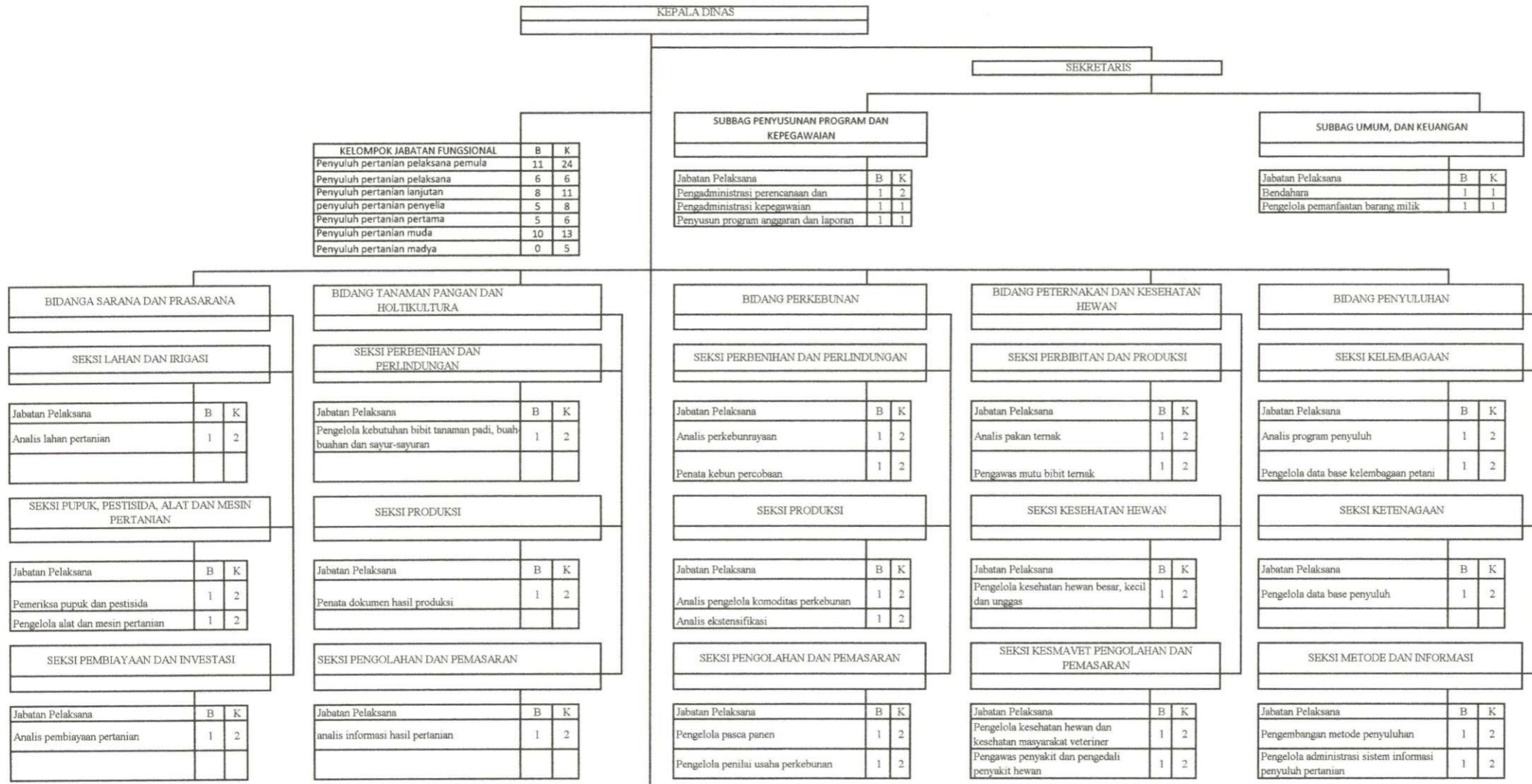
KABAG HUKUM    DINASRADA DAN KANTOR    ASS    SEKDA    WADUP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

1. PETA JABATAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO



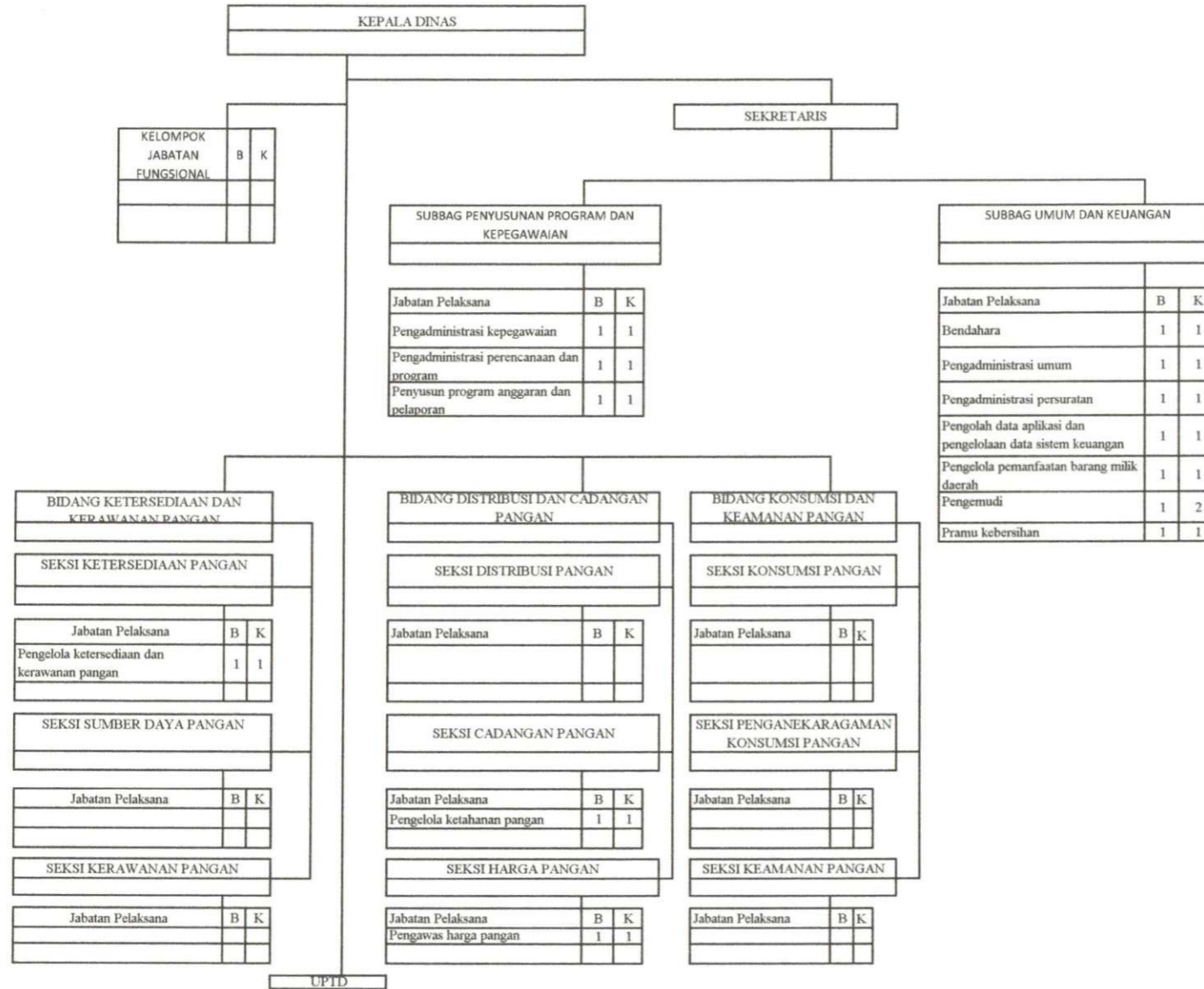
UPTD

Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KEMERAI	DINAS PERTANIAN	ASB	SEKDA	KWADU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

u. PETA JABATAN DINAS PANGAN KABUPATEN BOALEMO



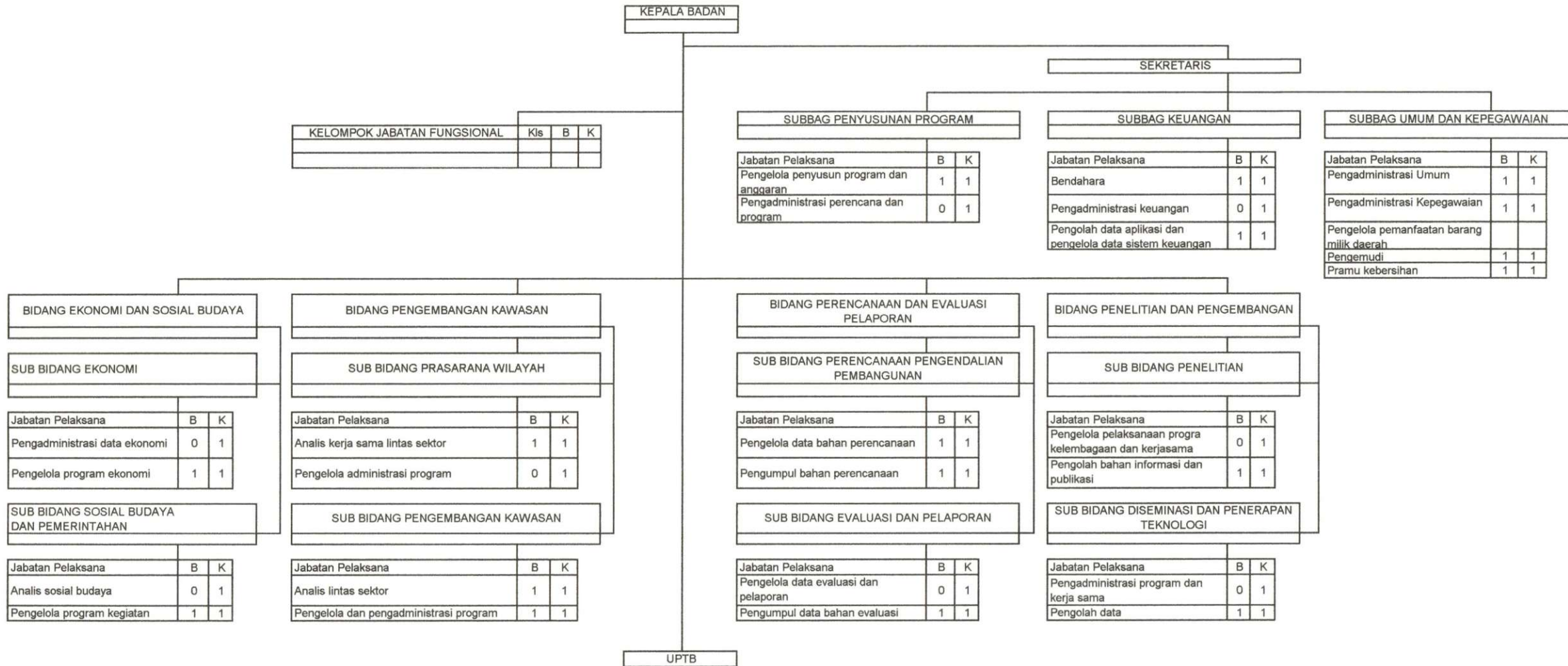
Keterangan  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Keuntungan) = Keuntungan pegawai sesuai hasil ASN

KABAG HUKUM  
 DINAS/BAKOR  
 ASST  
 BEKDA  
 WAKUP



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

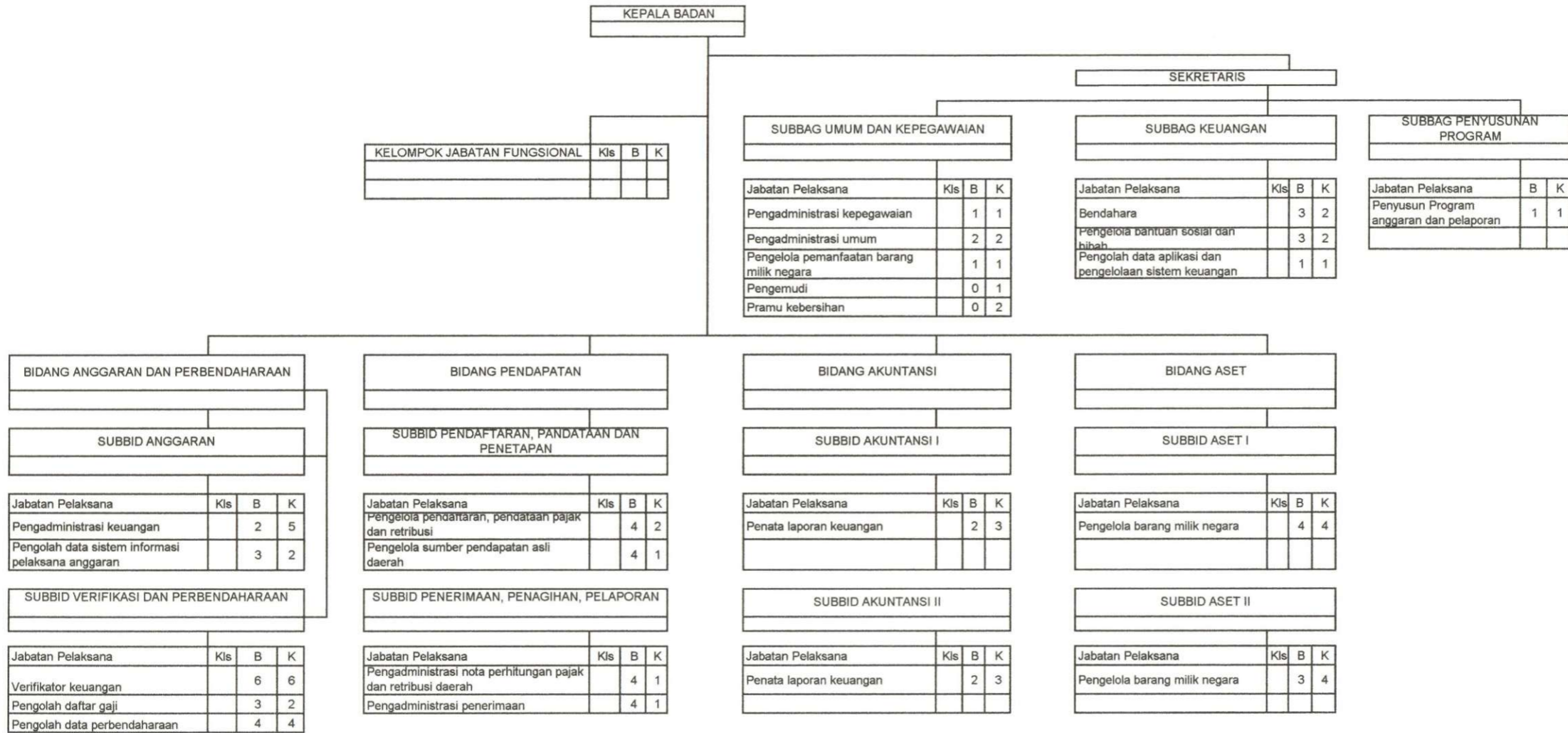
v. PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO



**Keterangan**  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABUPATEN BOALEMO  
 DINAS PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
 ASST. SEKDA  
 [Signature]

w. PETA JABATAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



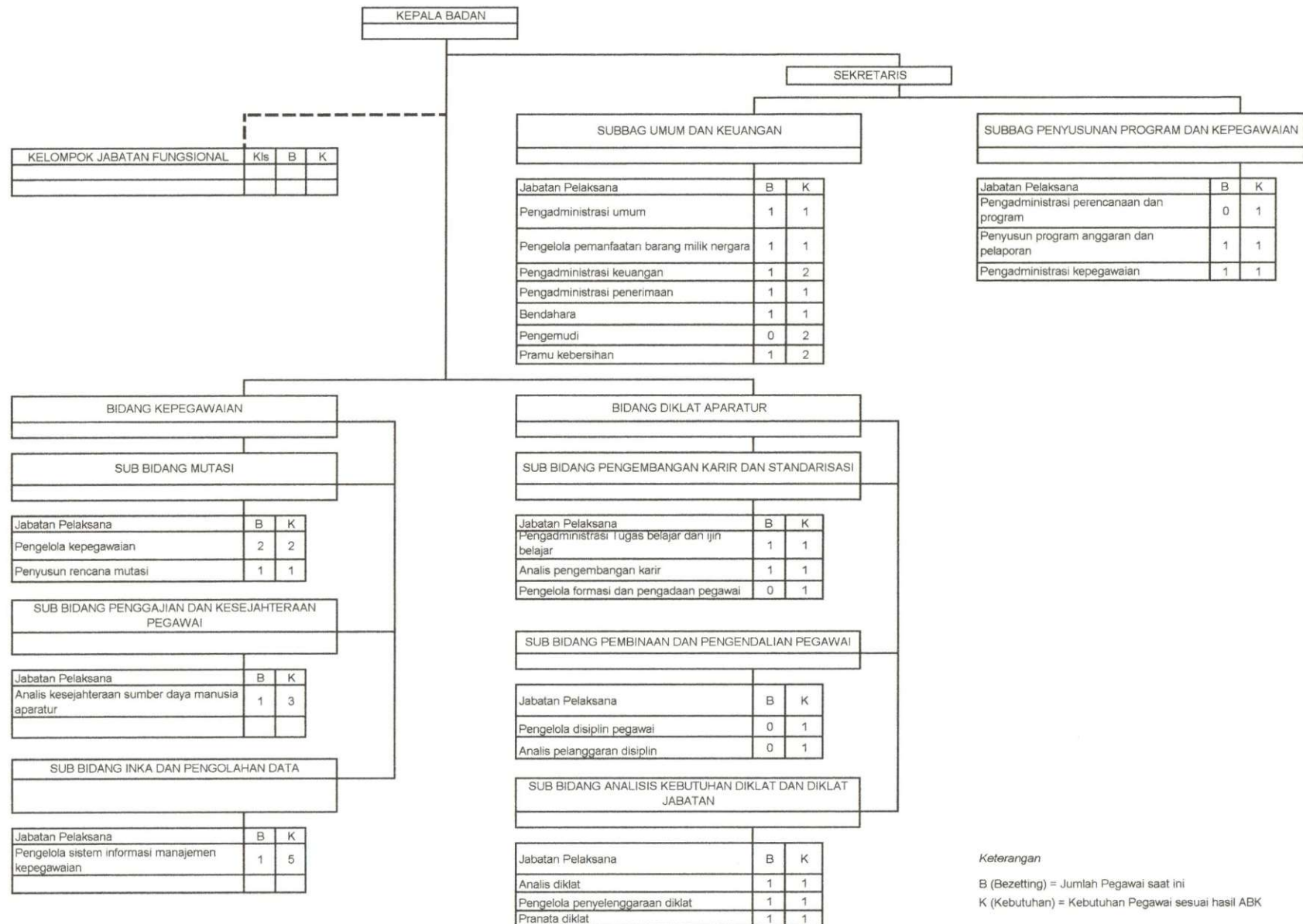
Keterangan

B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



x. PETA JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOALEMO



Keterangan

B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



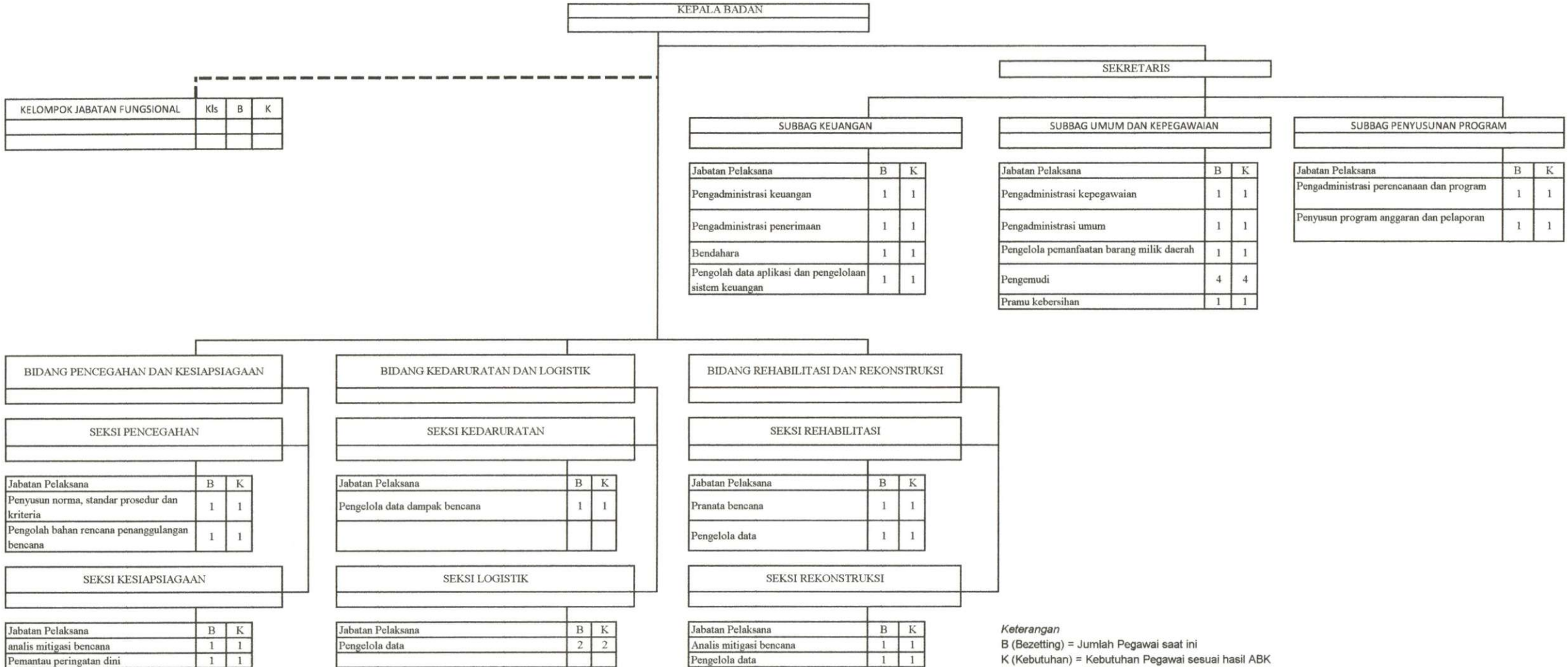
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

y. PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BOALEMO



KABUPATEN BOALEMO  
 DINAS BADA  
 KANTOR  
 AS  
 SEKDA  
 WABUP

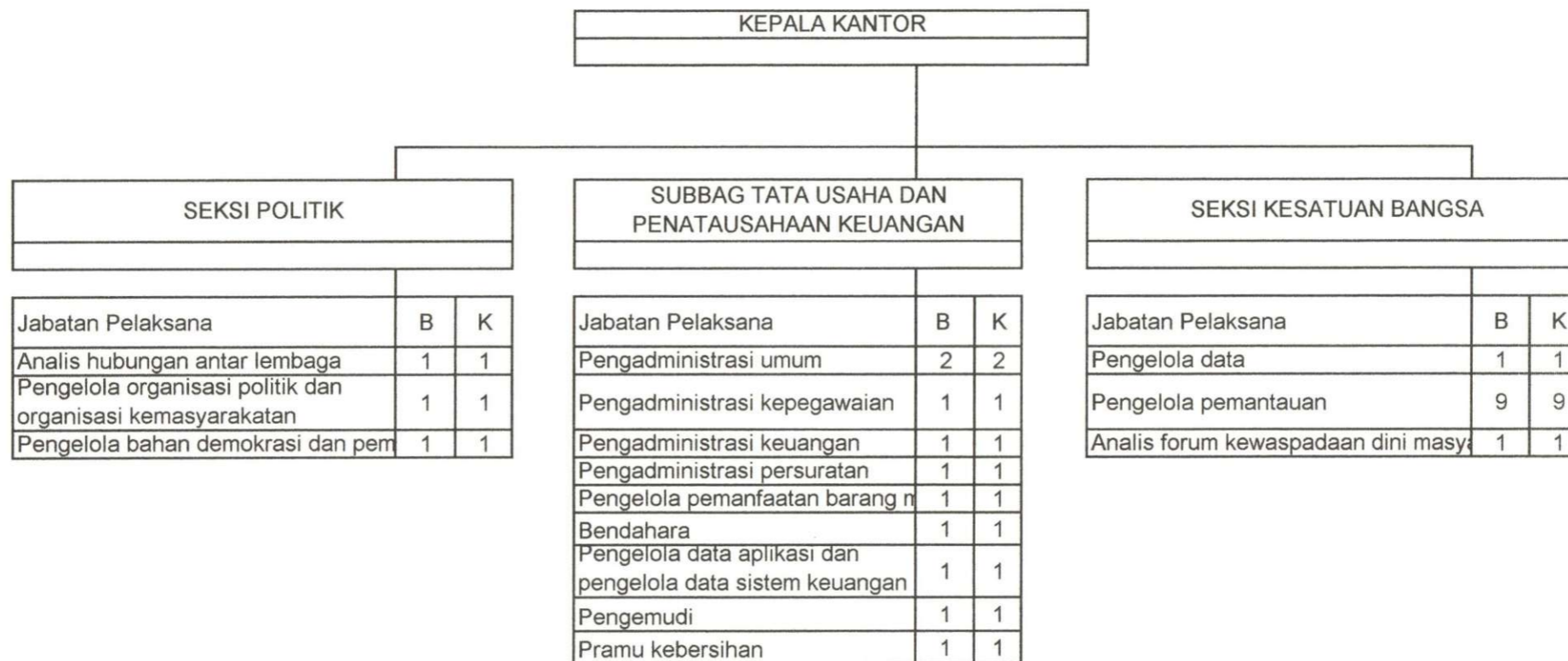
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

**z. PETA JABATAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOALEMO**



*Keterangan*

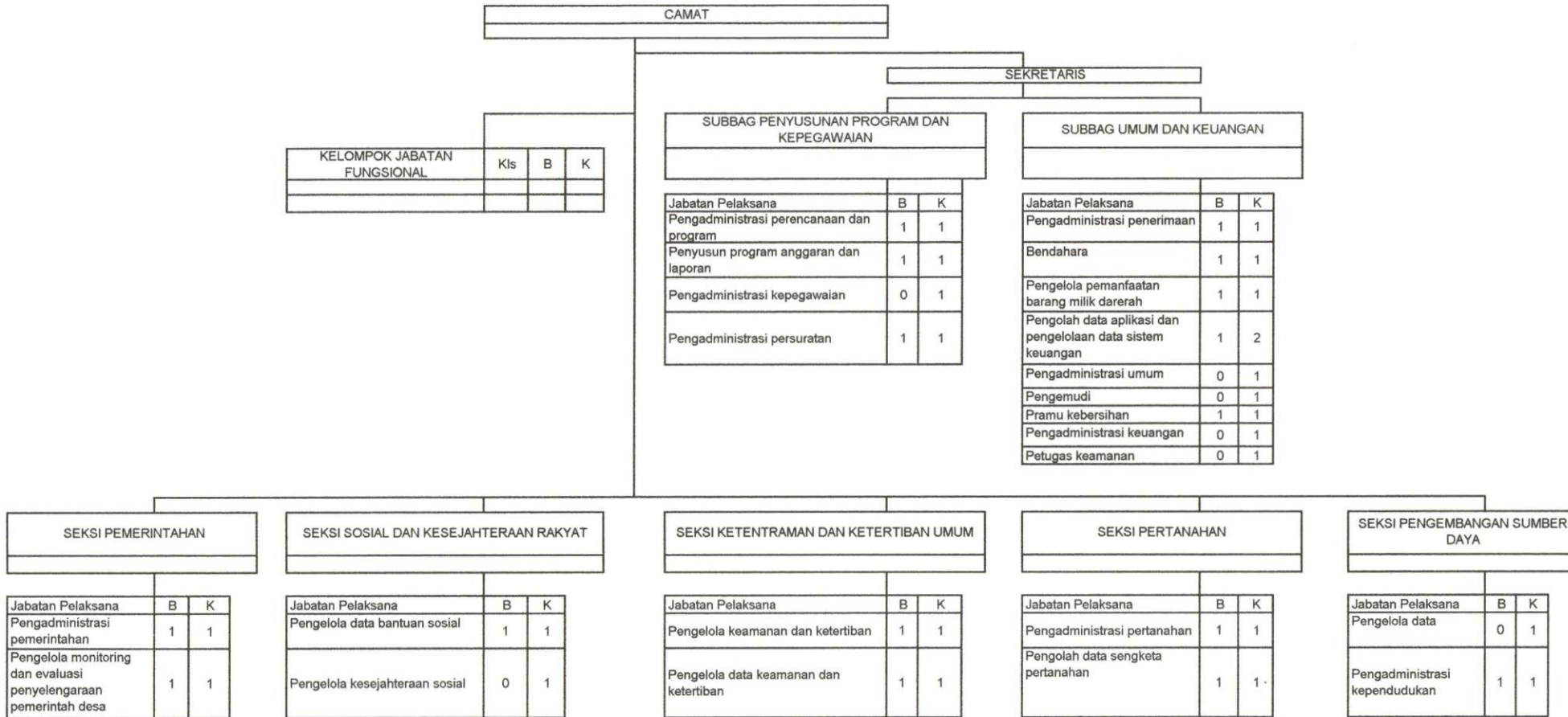
B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

aa. PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO

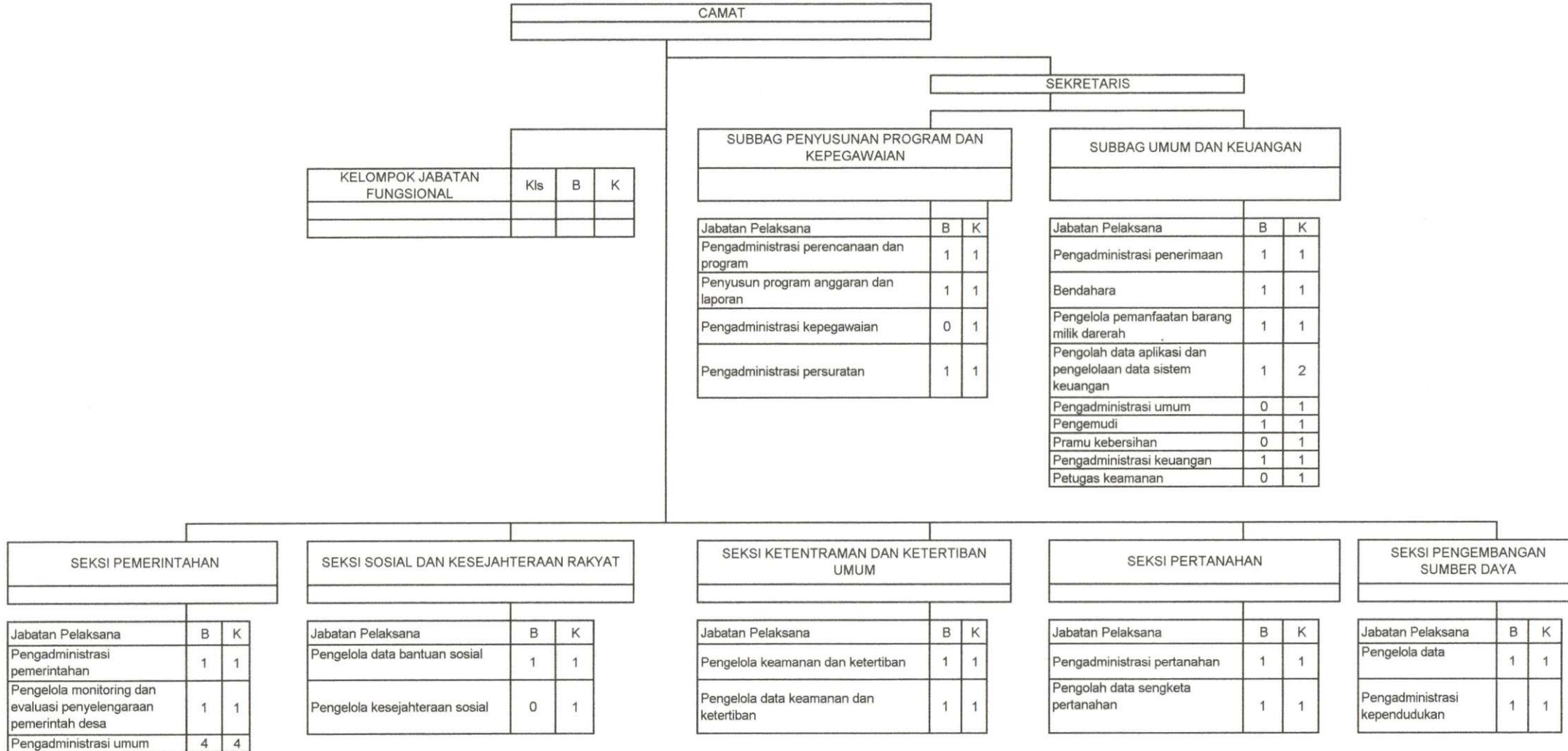


*Keterangan*  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABAG MUKURI	DINASBADAN KANTOR	AS P	SEKDA	MAKSIIP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

bb. PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO



Keterangan

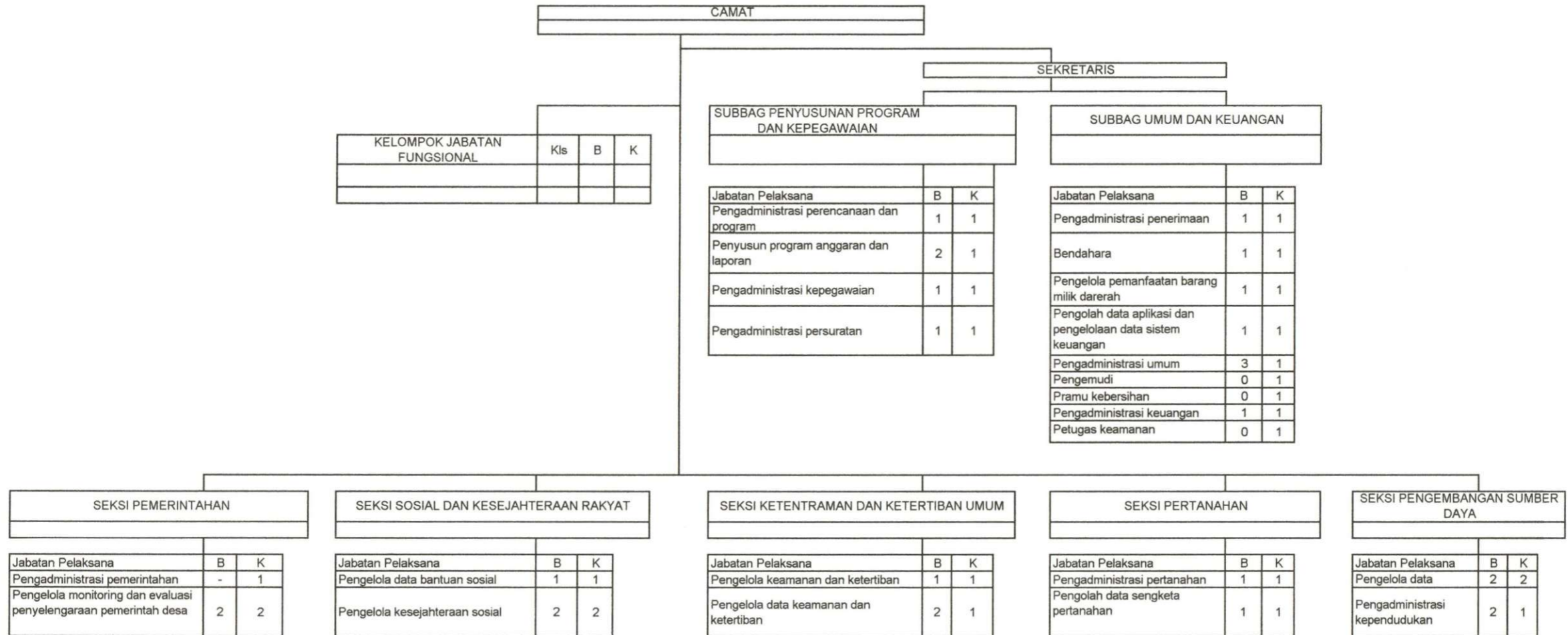
B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABUPATEN BOALEMO	DINAS/MAKAM KANTOR	AGS	SEKDA	WASUP
-------------------	--------------------	-----	-------	-------

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

cc. PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN MANANGGU KABUPATEN BOALEMO



*Keterangan*  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK

KABUPATEN BOALEMO  
 DINAS KECAMATAN MANANGGU  
 ASS  
 SEKDA  
 WABUP



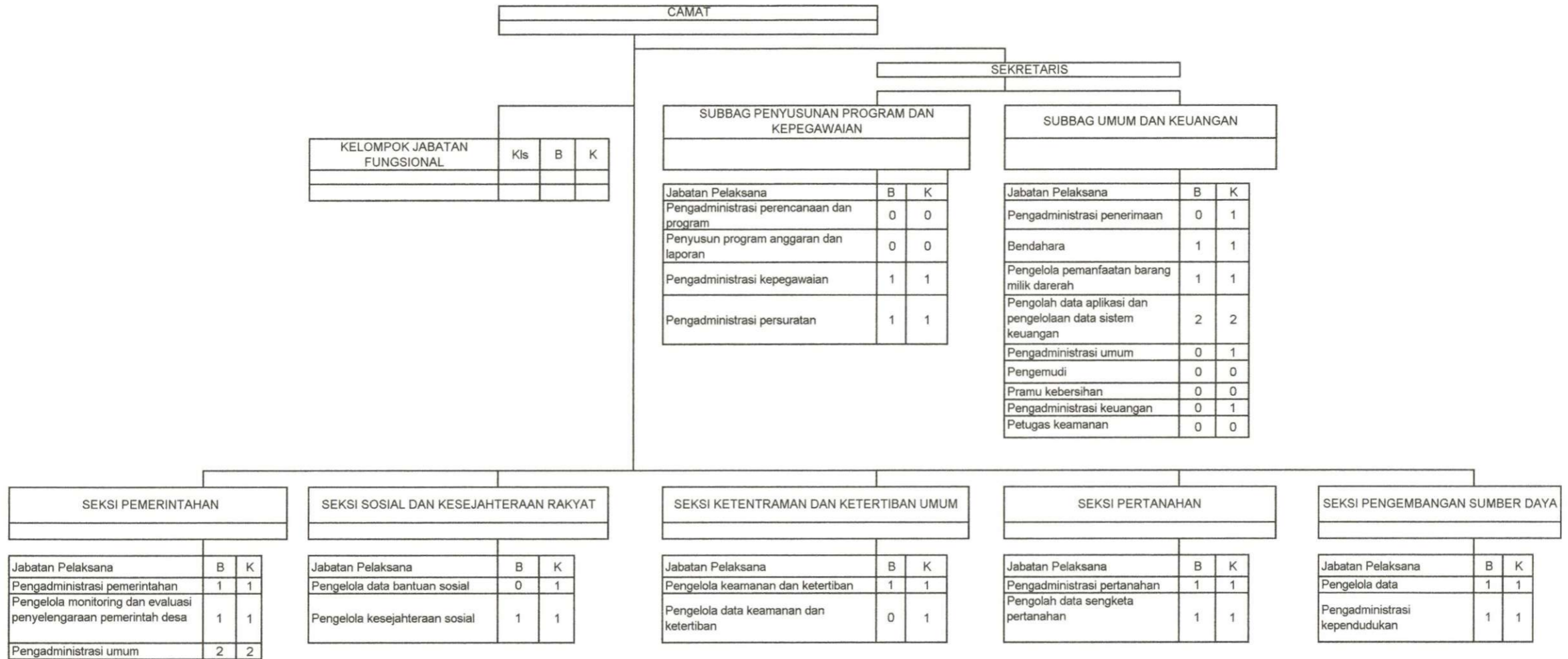
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

dd. PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO



*Keterangan*

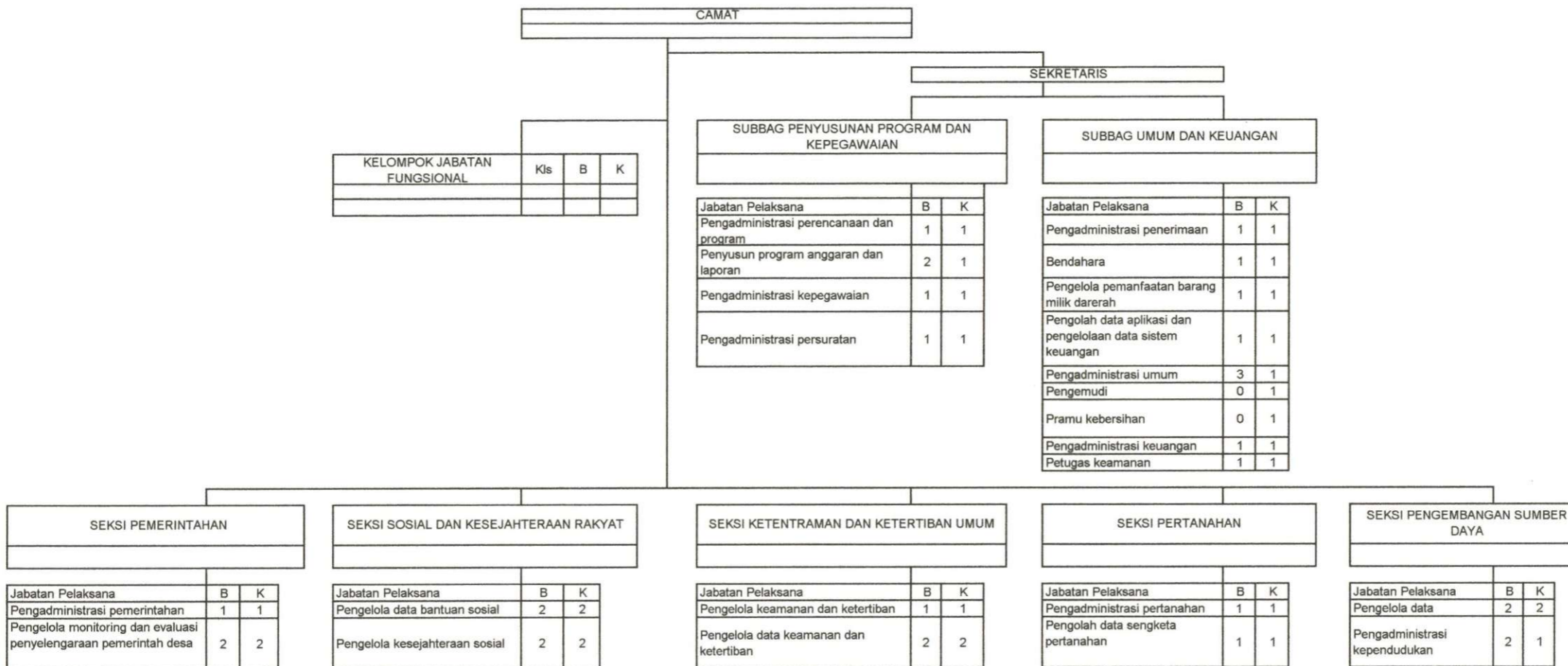
B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO  
 NOMOR : 20 Tahun 2020  
 TANGGAL : 3 Feb 2020  
 TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

ee. PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO



*Keterangan*  
 B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini  
 K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



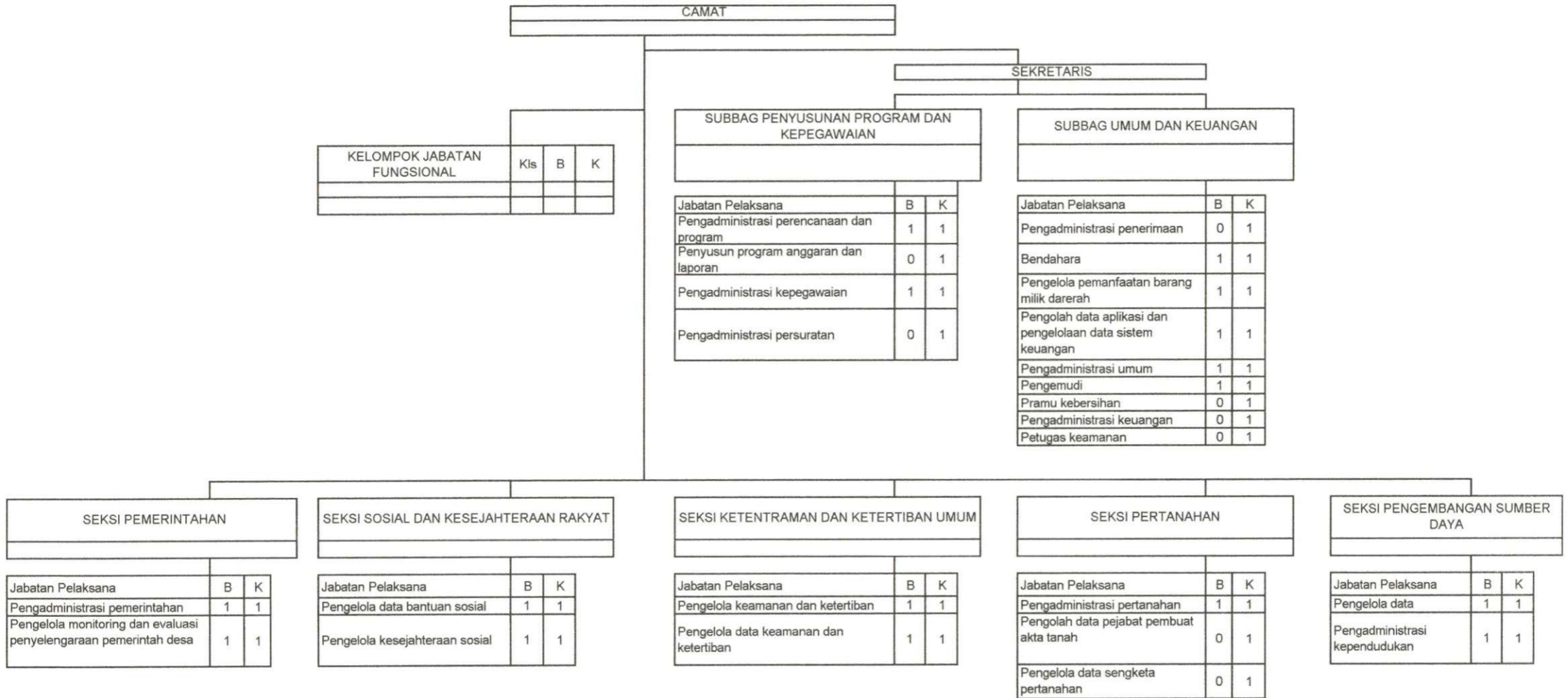
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

ff. PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BOALEMO



Keterangan

B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK



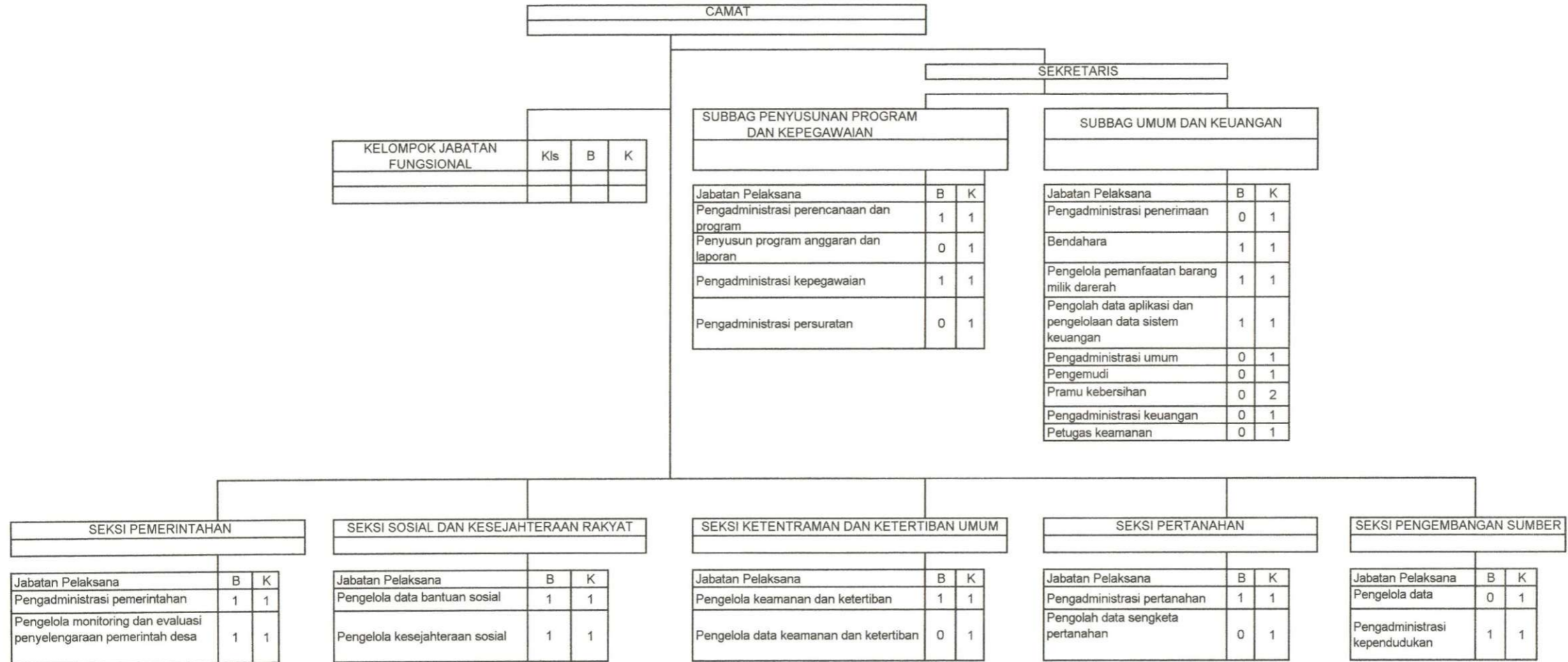
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 20 Tahun 2020

TANGGAL : 3 Feb 2020

TENTANG : PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

gg. PETA JABATAN KANTOR KECAMATAN PAGUYAMAN PANTAI KABUPATEN BOALEMO



Keterangan

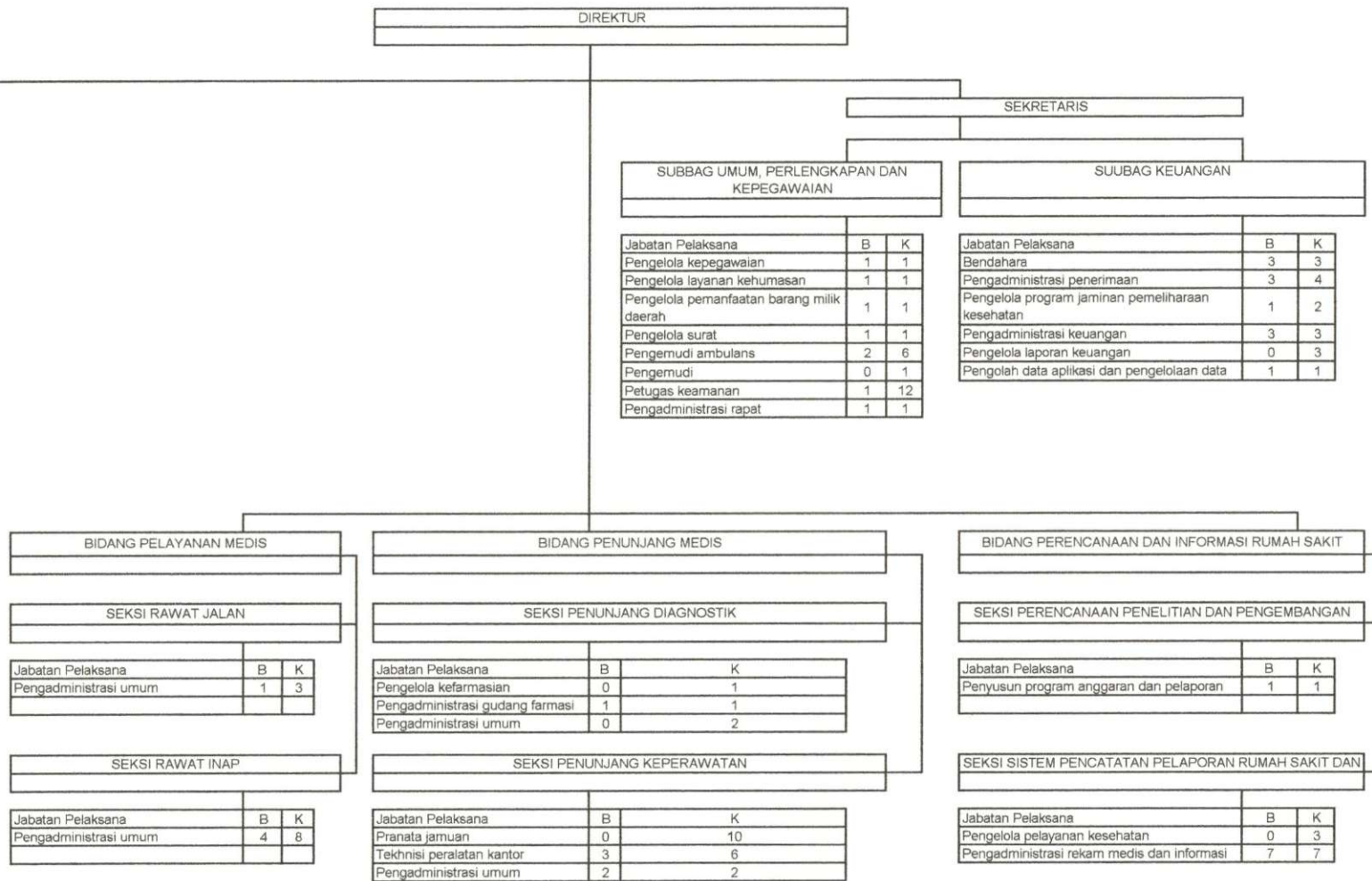
B (Bezetting) = Jumlah Pegawai saat ini

K (Kebutuhan) = Kebutuhan Pegawai sesuai hasil ABK




hh. PETA JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOALEMO

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	B	K
Dokter pertama	1	13
Dokter muda	10	10
Dokter madya	4	5
Dokter utama	0	3
Dokter gigi pertama	0	1
Dokter gigi muda	0	0
Dokter gigi madya	1	1
Dokter gigi utama	0	0
Apoteker pertama	1	6
Apoteker muda	1	3
Apoteker madya	0	2
Apoteker utama	0	1
Perawat terampil	6	68
Perawat mahir	34	34
Perawat penyelia	10	18
Perawat pertama	1	33
Perawat muda	1	4
Perawat madya	0	4
Perawat utama	0	1
Fisioterapis pelaksana	0	0
Fisioterapis pelaksana lanjutan	1	1
Fisioterapis penyelia	0	0
Fisioterapis pertama	1	1
Fisioterapis muda	0	0
Fisioterapis madya	0	0
Fisikawan medis pertama	0	2
Fisikawan medis muda	0	0
Fisikawan medis madya	0	0
Bidan pelaksana	1	17
Bidan pelaksana lanjutan	8	8
Bidan penyelia	5	9
Bidan pertama	0	4
Bidan muda	1	4
Bidan madya	0	2
Nutrisionis pelaksana	1	4
Nutrisionis pelaksana lanjutan	4	4
Nutrisionis Penyelia	0	2
Nutrisionis pertama	1	1
Nutrisionis muda	3	3
Nutrisionis madya	0	2
Perawat gigi terampil	1	1
Perawat gigi mahir	2	1
Perawat gigi penyelia	0	1
Radiografer pelaksana	0	3
Radiografer pelaksana lanjutan	2	2
Radiografer penyelia	0	2
Pranata laboratorium kesehatan pelaksana	0	9
Pranata laboratorium kesehatan pelaksana lanjutan	4	5



Pranata laboratorium kesehatan penyelia	0	1
Teknisi elektromedis terampil	1	3
Teknisi elektromedis mahir	0	4
Teknisi elektromedis penyelia	1	1
Perekam medis pelaksana	0	13
Perekam medis pelaksana lanjutan	0	6
Perekam medis penyelia	0	3
Asisten apoteker pelaksana	1	6
Asisten apoteker pelaksana lanjutan	1	9
Asisten apoteker penyelia	0	6
Sanitarian pelaksana	1	1
Sanitarian pelaksana lanjutan	0	0
Sanitarian penyelia	1	1
Asisten penata anastesi terampil	0	0
Asisten penata anastesi mahir	2	2
Asisten penata anastesi penyelia	0	0

BUPATI BOALEMO, ↓  
  
↓ DARWIS MORIDU ↓